



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

MASTERPLAN SMART CITY
KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integral yang dapat meningkatkan fungsi Pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, budaya dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perlu disusun *Masterplan Smart City* di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bogor tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2013 Nomor 191);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 70);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY* KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah.....

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2019 – 2023.
7. *Smart City* adalah konsep pengelolaan kota berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi dan melibatkan partisipasi masyarakat.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya *smart city* Kabupaten Bogor sebagai berikut:

- a. meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat Kabupaten Bogor yang sehat dan cerdas;
- b. menjadikan Kabupaten Bogor sebagai tempat layak huni dengan kota lebih hijau, bersih dan berkelanjutan;
- c. meningkatkan perekonomian masyarakat yang tangguh dan kompetitif; dan
- d. meningkatkan keberlangsungan lingkungan hidup dengan menggunakan tiga pendekatan, antara lain:
 1. pendekatan pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi;
 2. pendekatan pemberdayaan potensi Kabupaten Bogor; dan
 3. pendekatan pemberdayaan manusia yang berkesinambungan.

BAB III.....

BAB III
SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN
Bagian Kesatu
Sistematika
Pasal 3

Sistematika *Masterplan Smart City* Kabupaten Bogor, sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. visi, misi dan ukuran keberhasilan *smart city*;
- c. strategi pembangunan *smart city*;
- d. peta jalan *smart city* Kabupaten Bogor; dan
- e. *quick win smart city* Kabupaten Bogor.

Bagian Kedua
Isi dan Uraian
Pasal 4

Isi dan uraian *masterplan smart city* Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 27 Oktober 2020

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 77 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 Oktober 2020



*MASTERPLAN
SMART CITY KABUPATEN
BOGOR*

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
2018

DAFTAR ISI....

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	3
1.1 LATAR BELAKANG	3
1.2 TUJUAN <i>MASTERPLAN</i>	4
1.3 LANDASAN HUKUM.....	4
1.4 KERANGKA BERPIKIR <i>SMART CITY</i>	5
VISI, MISI DAN UKURAN KEBERHASILAN <i>SMART CITY</i>	7
2.1 VISI DAN MISI <i>SMART CITY</i> KABUPATEN BOGOR	7
2.2 INDIKATOR KEBERHASILAN <i>SMART CITY</i> KABUPATEN BOGOR	7
STRATEGI PEMBANGUNAN <i>SMART CITY</i>	12
3.1 <i>SMART GOVERNANCE</i>	12
3.2 <i>SMART LIVING</i>	16
3.3 <i>SMART ENVIRONMENT</i>	19
3.4 <i>SMART SOCIETY</i>	22
3.5 <i>SMART ECONOMY</i>	25
3.6 <i>SMART BRANDING</i>	29
INOVASI DAERAH	33
A. <i>Situ Front City of Cibinong Raya</i>	33
B. Anugrah Pancaniti Apik	33
C. Pelatihan Pemetaan Drone Desa.....	33
D. Gerakan Pembangunan menuju Keluarga Hidup Layak.....	33
E. Desa Mengajar	34
RENCANA AKSI.....	35
PETA JALAN <i>SMART CITY</i> KABUPATEN BOGOR.....	37
<i>QUICK WIN SMART CITY</i> KABUPATEN BOGOR.....	65
PENUTUP.....	67

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring perkembangan teknologi dengan pesat, terutama teknologi informasi dan komunikasi, memicu masyarakat modern mendapatkan layanan yang praktis, mudah, dan efisien. Disamping itu potensi pemanfaatannya secara luas, harus mampu menjaga independensi, jujur, adil, etis dan faktual, dalam penyampaian berita, serta dapat membantu mensosialisasikan berbagai program pemerintah daerah kepada masyarakat. Hal ini dapat menjadi jembatan yang mengkomunikasikan fungsi pemerintah daerah dengan harapan masyarakat atau sebaliknya, sebab seluruh media informasi merupakan sarana yang sangat tepat, efektif dan efisien dalam mengedukasi masyarakat, agar menjadi lebih cerdas dan memahami berbagai aspek dan masalah yang dihadapi, selain itu telah membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat.

Mengingat akan pentingnya fungsi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi ini, terutama untuk mendukung kegiatan-kegiatan di instansi pemerintahan maka wajar apabila Pemerintah Daerah Bogor berupaya untuk menempatkan pengelolaan data dan informasi ini pada tempat yang setara dan sama pentingnya dengan pengelolaan sumberdaya lainnya, bahkan saat ini telah menjadi kerangka dasar bagi semua aktivitas pemerintahan dan memungkinkan bagi fungsi manajerial dalam melakukan upaya pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien.

Namun demikian, nomenklatur *smart city* belum muncul baik sebagai subjek maupun objek ataupun wacana dalam dokumen rencana induk tersebut. Dengan demikian, tentunya dimensi-dimensi *smart city* yang terdiri dari *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart living*, *smart society*, dan *smart environment*, belum dijabarkan dengan lebih terperinci beserta indikator/tolok ukurnya masing-masing.

Oleh karena itu, sejalan dengan program kerja Gerakan Menuju 100 *Smart City* Indonesia dari Kementerian Kominfo RI. Pada tahun 2017, Gerakan Menuju 100 *Smart City* memilih 25 Kabupaten/Kota untuk difasilitasi dan didampingi dalam menyusun *Masterplan Smart City* dan merencanakan dan melaksanakan program *Quick Win Smart City*.

Masterplan....

Masterplan ini diharapkan akan menjadi panduan daerah dalam melakukan implementasi pembangunan berbasis *smart city* dalam jangka waktu 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun ke depan yang akan di *review* setelah 5 (lima) tahun pertama dilaksanakan atau secara periodik sesuai kebutuhan.

1.2 TUJUAN *MASTERPLAN*

Inisiatif *smart city* disusun berdasarkan permasalahan yang muncul di Kabupaten Bogor, sehingga menghasilkan inisiatif yang solutif yang secara umum bertujuan ingin meningkatkan :

1. Meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat Kabupaten Bogor yang sehat dan cerdas;
2. Menjadikan Kabupaten Bogor sebagai tempat layak huni dengan kota lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang tangguh dan kompetitif;
4. Meningkatkan keberlangsungan lingkungan hidup dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu a) pendekatan pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi, b) pendekatan pemberdayaan potensi kabupaten, serta c) pendekatan pemberdayaan manusia yang berkesinambungan.

1.3 LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan *Masterplan Smart City* Kabupaten Bogor ini adalah sebagai berikut :

1. Visi dan Misi Pembangunan Pemda Bogor;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. *Corporate Governance of Information Technology* ISO/IEC 38500:2008;
4. *Information Security Management* ISO/IEC 27001:2005 dan ISO/IEC 27002:2005;
5. ISO 27005:2008 *Information Security Risk Management*;
6. *Information Technology Service Management* ISO/IEC 20000:2005;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, tentang HaKI;

8. Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 57 tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-government* lembaga;
10. *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 *Smart City* di Indonesia.

1.4 KERANGKA BERPIKIR *SMART CITY*

Kerangka pikir (*frameworks*) *Smart City* (Kota Cerdas) dalam *Masterplan Smart City* ini disesuaikan dengan kerangka pikir yang telah dipaparkan dalam Buku Panduan Penyusunan *Masterplan Smart City* 2017 – Gerakan Menuju 100 *Smart City* yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tahun 2017. Istilah lain dari *Smart City* yang digunakan oleh Kabupaten Bogor adalah Kota Cerdas. Dalam upayanya membangun *Smart City*, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika melalui surat Nomor: 265 Kominfo/DJAI/AI.01.05/05/2017 perihal Penyampaian Hasil Seleksi *Assessment* Gerakan Menuju 100 *Smart City*.

Smart city dalam lingkup Kabupaten Bogor adalah sebuah kota yang menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur teknologi informasi, infrastruktur sosial, dan infrastruktur bisnis untuk memanfaatkan Penyusunan *Masterplan Smart City* Kabupaten Bogor menggunakan kerangka pikir yang telah dirumuskan oleh Kementrian Kominfo RI. *Masterplan smart city* yang dikembangkan untuk digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat hidup aman, nyaman dan berkelanjutan.

Pembangunan *smart city* di Kabupaten Bogor meliputi 6 (enam) elemen yaitu *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart society*, *smart living* dan *smart environment*. Masing-masing elemen terdiri dari 3 sub komponen.



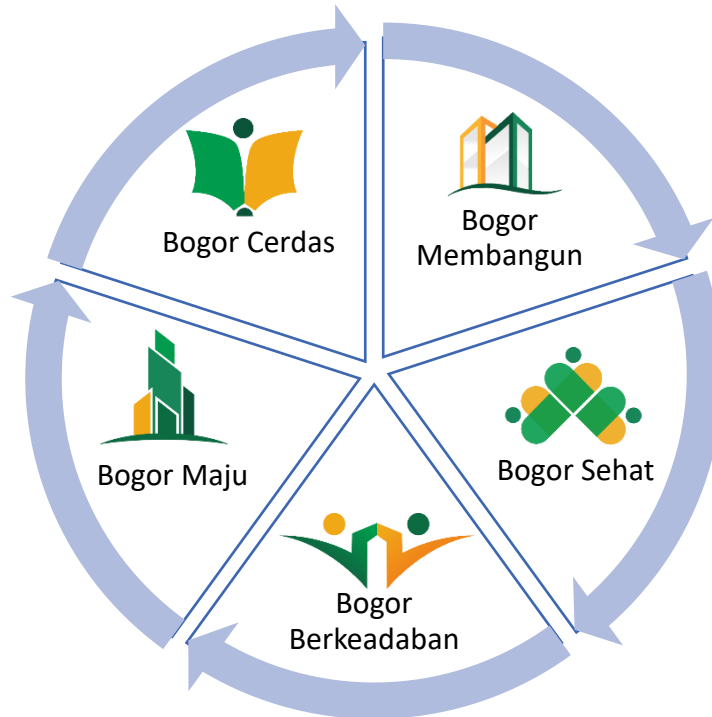
Gambar 1 . Kerangka *Smart City*

Smart city sebagai bentuk pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi tentunya harus melalui proses pemetaan (*sensing*), memahami (*understanding*) dan eksekusi yang efisien dan efektif (*acting*). Tentunya didampingi oleh mekanisme *controlling* yang baik, efisien dan efektif. Berikut adalah kerangka keterkaitan antara dimensi, area kerja dan indikator dari tiap dimensi sebagaimana gambar di atas.

VISI, MISI DAN UKURAN KEBERHASILAN *SMART CITY*

2.1 VISI DAN MISI *SMART CITY* KABUPATEN BOGOR

Dengan merujuk pada Visi Kabupaten Bogor yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban” serta Misi Kabupaten Bogor dan program Panca Karsa yaitu :



Gambar 2. Program Panca Karsa

Maka dibentuklah Visi dan Misi *Smart City* Kabupaten Bogor sebagai berikut, yaitu dengan Visi “Kabupaten Bogor yang Maju, Nyaman dan Berkeadaban berbasis Teknologi Informasi”. serta misi yang sama dengan Kabupaten Bogor yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik;
4. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan kesalehan sosial.

2.2 INDIKATOR KEBERHASILAN *SMART CITY* KABUPATEN BOGOR

Gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi dalam *Smart City* Kabupaten Bogor dapat ditunjukkan dalam arah kebijakan Pembangunan....

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023. Arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah.

Arah kebijakan yang menjadi 8endidika dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam visi dan misi pembangunan daerah tercantum dalam 8endi berikut ini :

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
Mewujudkan Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban					
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berkualitas					
1.1 Terwujudnya masyarakat Bogor cerdas.	a. Meningkatnya pelayanan pendidikan yang berkualitas.	1) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau.	a) Membangun, merehabilitasi dan merevitalisasi sekolah. b) Memberikan penunjang pendidikan melalui Kartu Bogor Cerdas. c) Meningkatkan kualitas pendidik dan siswa. d) Optimalisasi koordinasi dan pembinaan wilayah.		
	b. Meningkatnya budaya literasi.	1) Peningkatan minat baca masyarakat.	a) Mengembangkan Pelayanan Perpustakaan.		
1.2 Terwujudnya masyarakat Bogor sehat.	a. Meningkatnya kualitas kesehatan.	1) Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.	a) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan. b) Mendorong perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). c) Menyediakan layanan Bogor Siaga.		
			b. Meningkatnya ketahanan pangan daerah.	1) Diversifikasi pangan bergizi.	a) mendorong budaya konsumsi makanan bergizi.
			c. Menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk alami.	1) Pengendalian pertumbuhan penduduk alami.	a) Meningkatkan kepesertaan KB.
	Misi 2 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan				
2.1 Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.	a. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.	1) Peningkatan kerjasama dan peluang penyediaan lapangan kerja.	a) Menyediakan pusat informasi dan pelayanan ketenagakerjaan.		
		2) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.	a) Membangun Sistem Layanan Rujukan		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Terpadu dan Puskesmas tiap desa.
		3)	b)
	b. Meningkatkan daya saing daerah.	1) Peningkatan produksi pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan yang berdaya saing.	a) Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah tanaman pangan, hortikultura, perkebunan.
			b) Meningkatkan produksi dan olahan perikanan dan peternakan, kualitas dan kuantitas kelembagaan, serta sumberdaya manusia perikanan dan peternakan.
			c) Penanganan penyakit ternak dan zoonosis.
		2) peningkatan promosi, pengembangan destinasi dan penguatan jejaring pariwisata.	a) mengembangkan pariwisata yang edukatif dan kreatif berbasis sumberdaya alam yang berkelanjutan.
		4) Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, koperasi dan Bumdes.	a) Meningkatkan kualitas kelembagaan, akses bahan baku, pasar dan pembiayaan.
		5) Peningkatan efisiensi dan efektivitas BUMD.	a) Meningkatkan produktivitas BUMD.
		6) Penyediaan data peluang investasi dan pemberian kemudahan berusaha.	a) Menyediakan informasi peluang investasi.
		7) Peningkatan Prestasi Olahraga.	a) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Insan Olahraga.
	b) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Olahraga Olahraga.		
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik			
3.1 Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.	a. Kualitas pelayanan publik meningkat.	1) Optimalisasi pelayanan prima terhadap masyarakat.	a) Penerapan standar pelayanan minimal dan SOP (Sistem Operasional dan Prosedur).
			b) Mengembangkan pelayanan adminduk.
			c) Implementasi pelayanan perijinan transparan dan terpadu.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	b. Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif.	1) Peningkatan penerapan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.	a) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Misi 4 : Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan			
4.1 Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan.	a. Meningkatkan infrastruktur wilayah yang terkoneksi dan dalam kondisi baik.	1) Pemantapan jalan dan jembatan.	a) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.
		2) Penambahan jalan dan jembatan baru.	a) Pembangunan jalan dan jembatan baru.
	b. Menurunnya tingkat kemacetan.	1) peningkatan pelayanan transportasi yang nyaman.	a) Menyelesaikan titik kemacetan.
			b) Meningkatkan kualitas angkutan massal.
	c. Meningkatkan kualitas permukiman masyarakat.	1) Pemenuhan sarana dan prasarana permukiman.	a) Rehabilitasi rumah tidak layak huni dan penataan kawasan permukiman kumuh.
			b) Penataan kawasan perkotaan.
			c) Penyediaan ruang terbuka hijau dan pemanfaatan ruang terbuka biru.
	d. Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup.	1) Pengelolaan sampah berbasis zonasi.	a) Penyediaan sarana prasarana persampahan.
		2) Pengelolaan kelestarian lingkungan.	a) Pelestarian Keanekaragaman hayati. b) Pengendalian pencemaran lingkungan.
	e. Mengurangi Risiko bencana.	1) Mitigasi bencana.	a) Membentuk desa tangguh bencana.
b) Meningkatkan <i>respon time</i> penanggulangan bencana kebakaran.			
Misi 5 : Mewujudkan kesalehan sosial			
5.1 Terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban.	a. Kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman, tertib dan tidak diskriminatif.	1) Peningkatan keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial di masyarakat.	a) Meningkatkan wawasan kebangsaan dan pembinaan politik.
		2) Peningkatan pelayanan keagamaan.	a) Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi di bidang keagamaan.

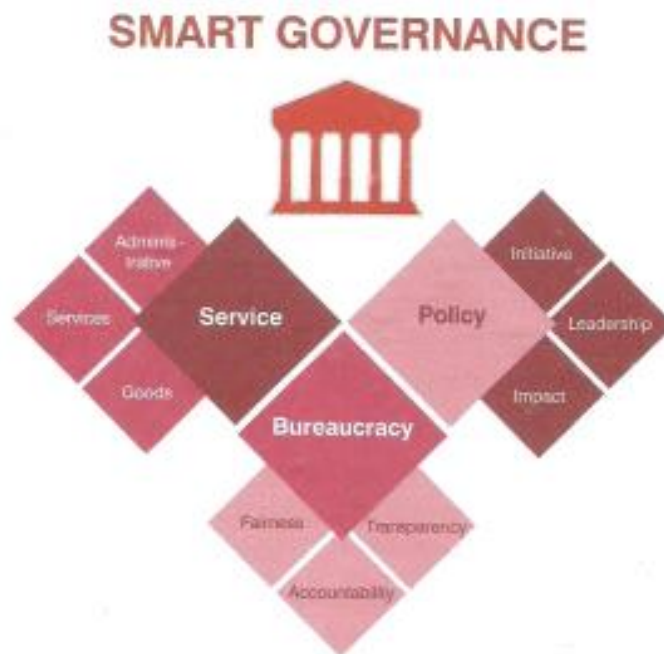
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		3) Pengendalian ketentraman dan ketertiban umum.	a) Penertiban PKL simpatik.
			b) Patroli ketertiban umum.
	b. Meningkatnya peranan wanita dalam pembangunan.	1) Peningkatan pemberdayaan perempuan.	a) Meningkatkan kompetensi perempuan.
	c. Terlestarikannya seni dan budaya.	1) Implementasi penanaman nilai budaya melalui pendidikan formal dan non formal.	a) melestarikan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal.

STRATEGI....

STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*

3.1 *Smart Governance*

Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. Sehingga *Smart Governance* di dalam dimensi *Smart City* merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara cerdas, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan proses bisnis yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.



Gambar 3 . Kerangka *Smart Governance*

Sasaran dari *Smart Governance* adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

Smart governance yang didefinisikan sebagai tata kelola pemerintahan yang cerdas, terdiri dari sub komponen :

- a) *Public service*, yaitu peningkatan kinerja pelayanan publik;
- b) *Bureaucracy*, yaitu peningkatan kinerja birokrasi pemerintah;
- c) *Public policy*, yaitu peningkatan efisiensi kebijakan publik.

Adapun....

Adapun penjelasan dari ketiga sub komponen diatas adalah :

a. Pelayanan publik (*service*)

Pelayanan publik (*service*) terdiri dari:

1. Pelayanan administrasi (*administrative*) yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat meliputi status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan atas barang Wujud dari produk tersebut adalah dokumen - dokumen resmi seperti SIUP, ijin trayek, ijin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya.
2. Pelayanan jasa (*services*) yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya pendidikan, kesehatan, penyelenggaraan transportasi dan lain sebagainya.
3. Pelayanan barang (*goods*) yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya jaringan telpon, listrik, air bersih, internet dan lain-lain.

b. Tata kelola birokrasi (*bureaucracy*)

Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (*fairness*), bertanggungjawab (*accountability*) dan keterbukaan (*transparency*). Misalnya: sistem *e-planning*, *e-budgeting*, *e-monev*, *e-sakip*, *e-lppd* dan lain-lain.

Pengembangan aplikasi *e-government* harus diarahkan menuju *integrated & interoperability e-government* atau yang saling berkomunikasi dan terhubung antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya serta lintas OPD atau yang disebut dengan *Smart e-Gov*. Pelayanan *Smart e-Gov* ini perlu didukung dengan sebuah "*City Operation Center (COC)* atau *Command Center Room*".

c. Kebijakan pemerintah (*policy*)

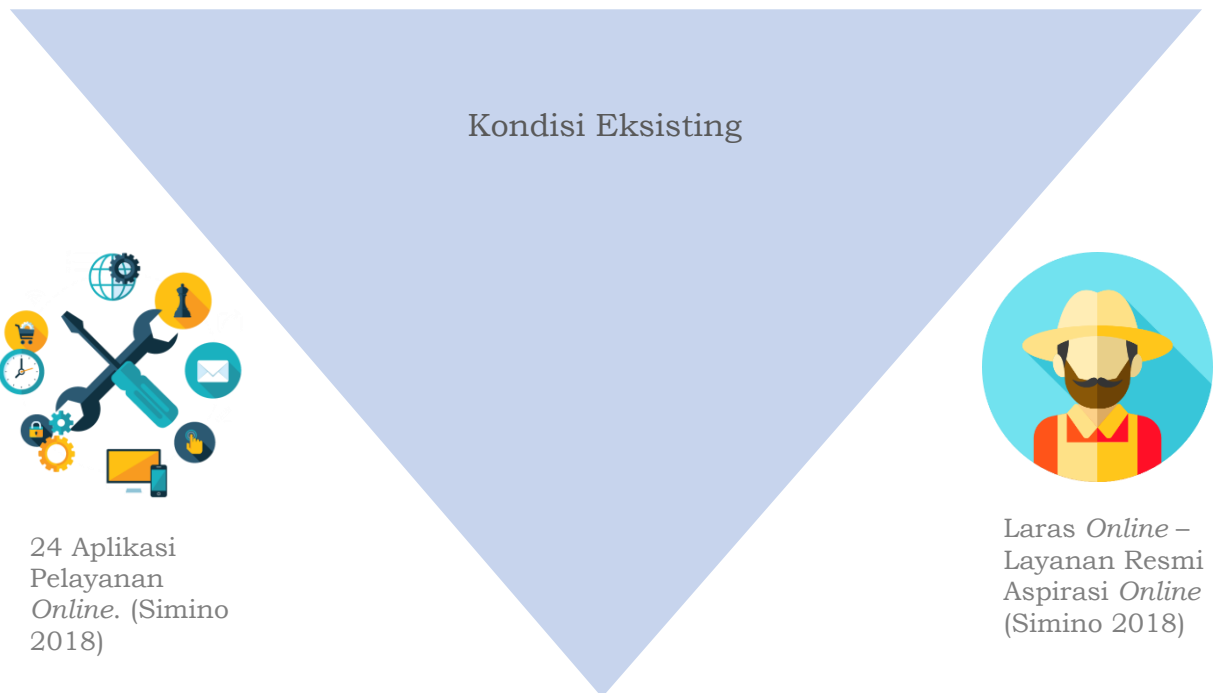
Kebijakan pemerintah (*policy*) merupakan perwujudan dari komitmen kepala daerah untuk mengambil keputusan (*leadership*) untuk membuat terobosan yang perlu (*initiative*) serta memberi dampak positif bagi masyarakat dan wilayahnya (*impact*). Kebijakan pemerintah (*policy*) dalam *smart governance* diarahkan untuk :

1. Mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti

dinamika...

dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional.

2. Membangun batas wilayah (*edge*), membangun penanda sebuah lokasi yang penting, berkesan bagi pengunjung (*landmark*), menyediakan navigasi yang unik menuju kota (*signage*), struktur jalan yang teratur (*path*), dan titik simpul kota (*node*) seperti alun-alun, simpang dan lain-lain.



24 Aplikasi Pelayanan Online. (Simino 2018)



Laras Online – Layanan Resmi Aspirasi Online (Simino 2018)



32 Inovasi Perangkat Daerah (Simino 2018)

Inisiatif....

Gelar Inovasi Daerah 2018 (Bappeda)



Sinova Jelita (Sistem Informasi dan Jaringan Penelitian). (Bappeda)



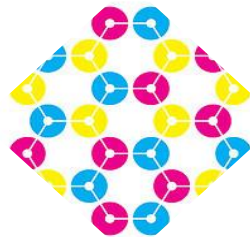
SIMRAL (Bappeda)



Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik I Tingkat Provinsi Jawa Barat 2018.



Caringin SINERGI (Informasi Kegiatan Kecamatan Caringin. (Bimtek Smartcity 2018)



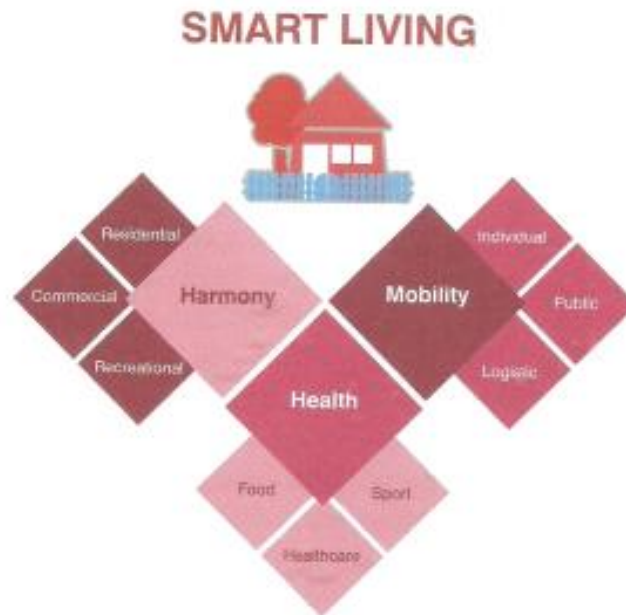
Inisiatif dan Strategi

- Meningkatkan kualitas pelayanan informasi penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat;
- Meningkatkan penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih;
- Meningkatkan profesionalisme aparatur dan kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia;
- Menerapkan manajemen pengelolaan kepegawaian yang berkeadilan;
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur kecamatan;
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparat penyelenggara pemerintahan desa;
- Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan dan keprotokolan Kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap perpustakaan;
- Meningkatkan jumlah kunjungan ke perpustakaan;
- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kearsipan;
- Meningkatkan penertiban gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat;
- Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi pembentukan Kabupaten Bogor Barat;
- Membentuk produk hukum daerah yang mengikat dan memenuhi syarat yuridis, filosofis dan sosiologis;
- Meningkatkan Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah;
- Merumuskan kebijakan daerah yang adaptif dan efektif mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Meningkatkan kualitas pelayanan fungsi legislatif;
- Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang daerah;
- Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor;
- Meningkatkan kualitas laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan;
- Menyelenggarakan pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE.

3.2 Smart Living

Smart living diterjemahkan menjadi dukungan pengelolaan ekosistem tempat hidup yang cerdas. *Smart living* terdiri dari sub komponen:

- a. *Harmony*, yaitu harmonisasi lingkungan yang nyaman;
- b. *Health*, yaitu menjamin fasilitas dan pelayanan kesehatan;
- c. *Mobility*, yaitu membangun transportasi dan logistik.



Gambar 4. Kerangka Kerja *Smart Living*

Smart living adalah gambaran dari sebuah lingkungan tempat tinggal yang cerdas bagi penduduknya, dengan kriteria harus layak huni, nyaman dan aman. Tiga dimensi utama dari *smart living* adalah kehidupan yang harmoni (*harmony*), kehidupan yang sehat (*health*) dan didukung dengan alat transportasi yang mudah, murah dan nyaman (*mobility*).

a. Harmonisasi tata ruang wilayah (*harmony*)

Harmoni adalah sebuah lingkungan yang terintegrasi antara lingkungan pemukiman (*residential*), lingkungan pusat kegiatan bisnis (*commercial*) dan didukung fasilitas rekreasi untuk keluarga (*recreation*).

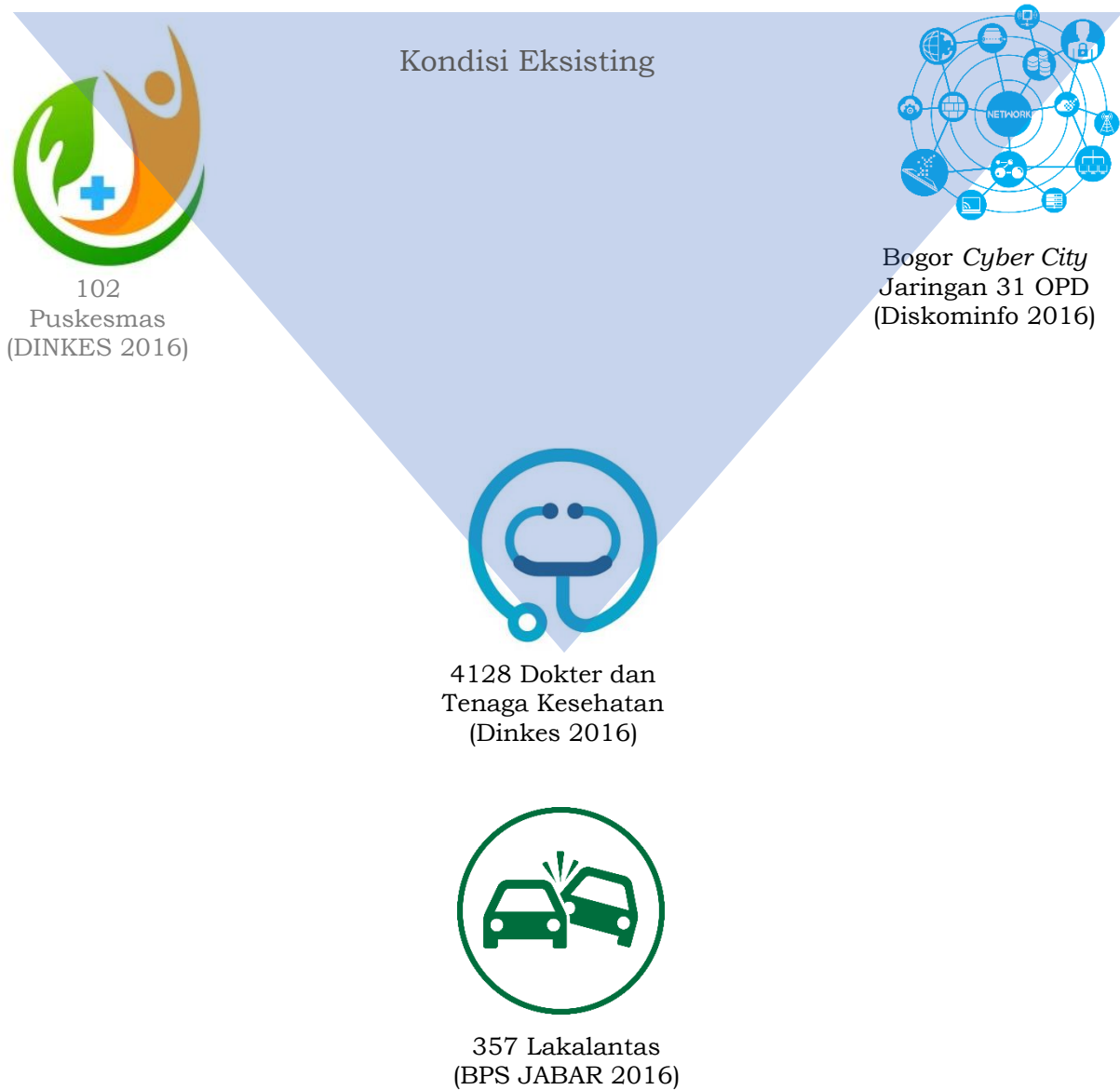
b. Prasarana penunjang hidup sehat (*health*)

Hidup sehat harus didukung dengan tercukupinya kebutuhan dasar akan makanan yang sehat (*food*), fasilitas yang mendukung untuk pemenuhan kebutuhan perawatan kesehatan (*healthcare*), hingga fasilitas ruang yang nyaman untuk berolah raga (*sport*).

c. Pelayanan....

c. Pelayanan transportasi (*mobility*)

Mobility adalah sarana-prasarana transportasi yang menjamin kemudahan, kenyamanan, dan harga terjangkau untuk kebutuhan transportasi pribadi (*individual*), transportasi umum (*public*), hingga transportasi untuk pengiriman barang (*logistic*).



Inisiatif...

Inisiatif dan Strategi

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan;
- Meningkatkan jumlah kepesertaan dan kualitas jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, rentan miskin dan masyarakat yang tenaganya dibutuhkan oleh pemda;
- Mengembangkan sistempel layanan kesehatan berbasis asuransi sosial;
- Fasilitasi peningkatan kesehatan lingkungan;
- Meningkatkan dan memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan;
- Meningkatkan jumlah dan kualitas peralatan diseluruh instalasi pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM yang berlaku;
- Meningkatkan jumlah dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan (medis dan para medis);
- Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan (medis dan para medis) sesuai dengan SPM yang berlaku;
- Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan baik dasar maupun rujukan bagi masyarakat;
- Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan Lansia;
- Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan imunisasi;
- Meningkatkan jumlah, pemerataan distribusi pengadaan obat, serta kualitas tenaga kesehatan (medis dan para medis) sesuai dengan SPM yang berlaku;
- Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pencegahan penyakit, pengendalian faktor risiko, dan peningkatan survailans epidemiologi;
- Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), dan peningkatan tatalaksana kasus;
- Fasilitasi kegiatan pembiayaan kesehatan, promosi kesehatan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- Penyelenggaraan pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran *out of pocket* (BPJS);
- Pemberian subsidi pemerintah untuk semua lini pelayanan kesehatan.



- Pelayanan Geriatri Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Pasien Lanjut Usia.

- *Dashboard* untuk optimalisasi ketersediaan tempat tidur pada pelayanan rawat inap RSUD Ciawi. (Inovasi pelayanan publik KEMENPANRB 2018)



- SIMKAS – Sistem Informasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah. (DISDIK 2018)



- Pelayanan Jemput Bola "Jembol". (DISDUKCAPIL 2018)

3.3 Smart Environment

Smart environment yaitu pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan yang cerdas. *Smart environment* terdiri dari:

1. *Protection*, yaitu perlindungan lingkungan;
2. *Waste*, yaitu tata kelola sampah dan limbah;
3. *Energy*, yaitu membangun daya saing energi yang berkelanjutan.



Gambar 5. Kerangka Kerja *Smart Environment*

Manajemen tata kelola lingkungan cerdas (*smart environment*) paling tidak dilakukan terhadap tiga aspek penting, yaitu:

a. Perlindungan lingkungan (*protection*)

Perlindungan lingkungan mencakup perlindungan terhadap pencemaran udara (*air*), pencemaran air (*water*), dan pencemaran tanah (*soil*).

b. Manajemen pengelolaan limbah dan sanitasi (*waste*)

Pengelolaan limbah dan sanitasi antara lain limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah masyarakat luas.

c. Pengelolaan energi (*energy*).

Pengelolaan energi meliputi efisiensi penggunaan energi, penggunaan energi yang bertanggung jawab dan kelangsungan sumber daya energi.

Kondisi Eksisting



- ISPU Hasil uji Januari, di Gunung Sindur kadar partikel debunya 321 mg/Nm³, Pertigaan Mercedes Benz Desa Tlajung Udik Gunung Putri 477,83 mg/Nm³, Jalan Raya Alternatif Cibubur (Jembatan Perbatasan Gunung Putri-Bekasi) 362,82 mg/Nm³, Perempatan Cikeas Jalan Raya Alternatif Cibubur Gunung Putri 489,71 mg/Nm³.
- Pada Februari 2015 Jalan Raya Naroogong Limusnunggal Kecamatan Cileungsi 303,82 mg/Nm³, Jalan Raya Alternatif Cibubur depan Kantor Kecamatan Cileungsi 252,56 mg/Nm³, Jalan Raya Kawasan CCIE Citeureup 292,58 mg/Nm³.
- Maret, partikel debu Jalan Raya Pertigaan Kemang-Salabenda 252,09 mg/Nm³, Kantor Kecamatan Parung 235,57 mg/Nm³, Gunung Sindur Pasar Prungpung 321,40 mg/Nm³, Gunung sindur depan peternakan ayam 391,06 mg/Nm³. (DLH 2018)



- Penggunaan listrik rumah tangga naik 97.25 % (RPJMD 2015)



Sampah per hari 2700 ton hanya 600 ton yang mampu diangkut. (Dinas Kebersihan 2017)



Mobil DAMKAR dan Hydrant di 20 Kecamatan. (DAMKAR 2018)

Inisiatif...

Sistem Pengujian Kendaraan Bermotor (Si Keren) pada Dinas Perhubungan. (Inovasi pelayanan publik KEMENPANRB 2018)



25 titik Kampung Ramah Lingkungan.

Inisiatif dan Strategi

- Kampung ramah lingkungan melalui sinergi antara dunia usaha melalui Program Corporate Social Responsibility atau Community Development Kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (DLH 2018);
- Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor melalui kegiatan penghijauan, pengelolaan sampah dan pembuatan lubang biopori;
- Penyediaan tanaman vertikultur dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah;
- Edukasi lingkungan bagi warga masyarakat.

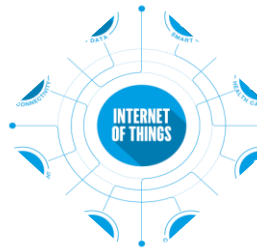
434 Unit Bank Sampah. (DLH 2018)



Satgas Lingkungan. (DLH)



Hemat 6000 KW Gerakan Earth Hour. (PLN Area Bogor)



IoT (*Internet of Things*) Pemantauan Limbah Sungai. (DLH)

ATIS – Aplikasi Terpadu Informasi Sampah. (DLH)

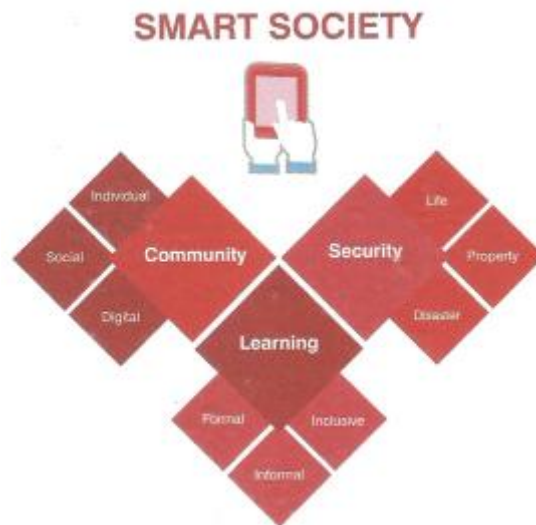


Video Tron Informasi Bencana 10 Kecamatan. (BPBDr 2018)

3.4 Smart Society

Smart society merupakan wujud dari partisipasi cerdas masyarakat. *Smart society* terdiri dari sub komponen:

- a. *Community*, membangun masyarakat yang smart;
- b. *Learning*, yaitu membangun sistem edukasi;
- c. *Security*, yaitu menjamin keamanan dan keselamatan.



Gambar 6. Kerangka Kerja *Smart Society*

Smart society merupakan gambaran dari masyarakat yang pintar, masyarakat yang semakin bergerak menuju ekosistem sosio-teknis di mana dimensi fisik dan virtual kehidupan yang lebih intens terjalin.

Partisipasi cerdas dari masyarakat dapat terwujud melalui:

a. Interaksi masyarakat (*community*)

yaitu cara memberdayakan interaksi sosial antara individu, kelompok sosial dan komunitas digital bersama-sama. Interaksi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, budaya dan lain-lainnya. Selain itu, di era keterbukaan informasi ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk semakin kolaboratif dan inovatif.

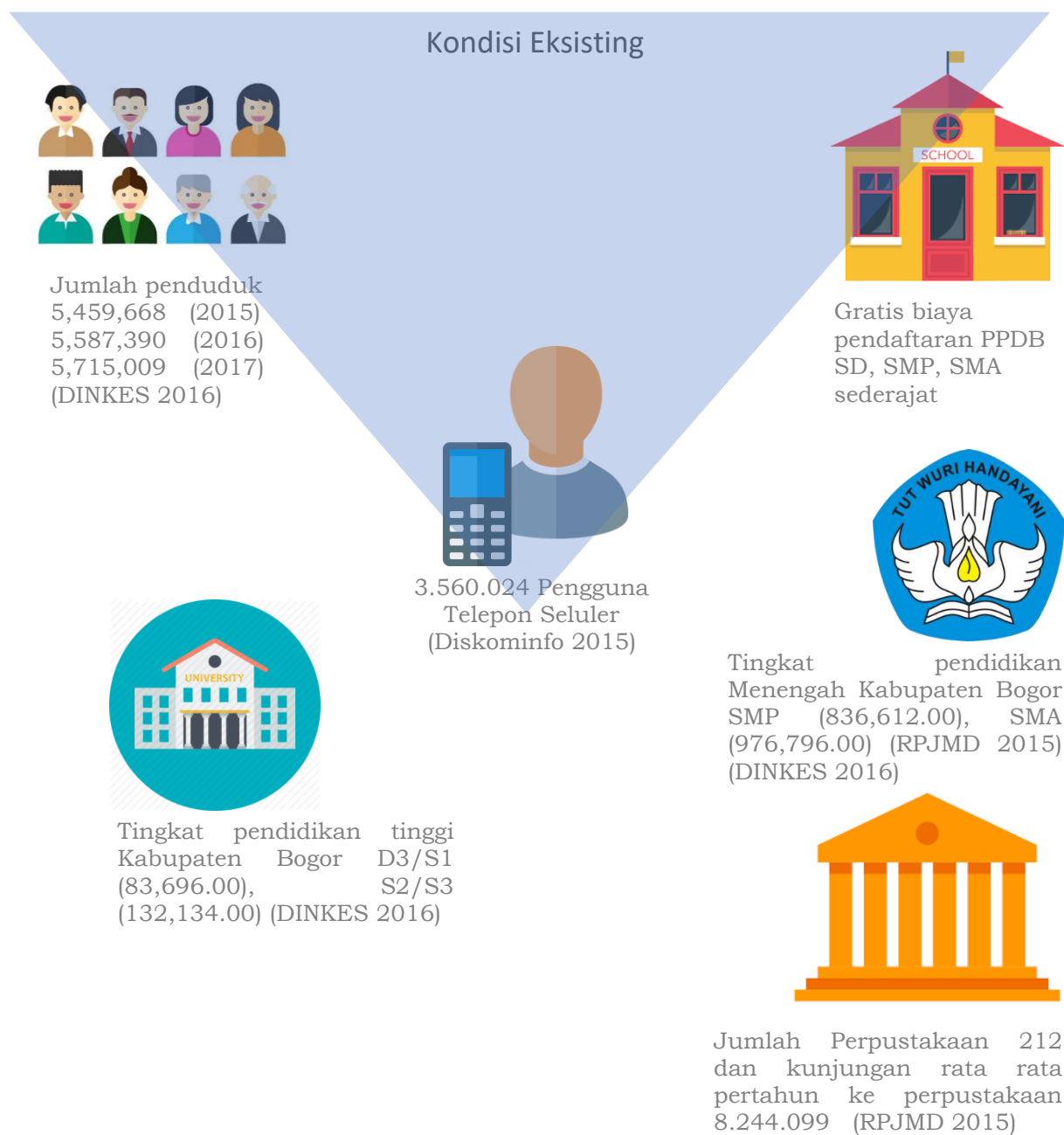
b. Proses pembelajaran (*learning*)

untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Keberadaan teknologi digital memberikan kesempatan kepada daerah untuk meningkatkan akses kepada masyarakat untuk memperoleh pengetahuan baik melalui perpustakaan *online* (*digital library*) maupun pertukaran pengetahuan secara digital (*knowledge exchange management*).

c. Manajemen....

c. Manajemen keamanan dan keselamatan (*security*)

penduduk dapat tinggal dengan aman dan nyaman, melalui pemanfaatan teknologi, sensor (*internet of things*) dan aplikasi. Manajemen keselamatan mencakup perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta benda, serta keselamatan atas resiko bencana terhadap masyarakat. Intinya adalah bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan untuk akses layanan darurat ketika dibutuhkan.



Inisiatif....

Inisiatif dan Strategi

- Menyelenggarakan pendidikan keaksaraan fungsional;
- Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan satu atap (sembilan tahun);
- Fasilitasi sekolah-sekolah swasta dalam rangka memperluas jangkauan kegiatan belajar mengajar;
- Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, pendidikan non formal (kesetaraan Paket A, B, dan C), pendidikan keaksaraan fungsional, serta pendidikan inklusif;
- Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar;
- Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Inklusif);
- Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal (Keaksaraan Fungsional);
- Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar, menengah, dan inklusif dengan jumlah memadai dan kualitas sesuai standar;
- Perbaikan terhadap mutu manajemen dan tata kelola pendidikan;
- Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan PKBM yang ada di masyarakat;
- Membangun sinergi yang kuat antara PKBM dengan pemerintah;
- Melakukan intervensi untuk mengidentifikasi siswa yang rentan terhadap kemungkinan putus sekolah;
- Fasilitasi kepada masyarakat swasta dalam pendirian sekolah ataupun Perguruan Tinggi Swasta;
- Fasilitasi KKN Tematik Perguruan Tinggi;
- Fasilitasi kesejahteraan untuk tenaga pendidik maupun non kependidikan.



SIGADIS (Sistem Pengaduan dan Data Informasi Ganda) – (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2018)



SIPALMA (Dinas Arsip dan Perpustakaan 2018)



Desa Mengajar. (DISDIK 2017)

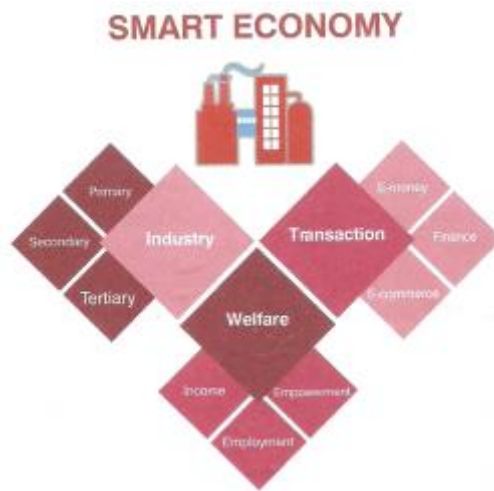


SID – Sistem Informasi Desa. (DPMD 2018)

3.5 Smart Economy

Smart economy yaitu sinergi pembangunan ekonomi secara cerdas. *Smart economy* terdiri dari:

- a. *Industry*, yaitu penataan industri primer, sekunder dan tersier;
- b. *Welfare*, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. *Transaction*, yaitu membangun ekosistem keuangan.



Gambar 7. Kerangka Kerja *Smart Economy*

Tiga dimensi *smart economy* terdiri dari pembangunan sektor industri, dukungan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dukungan fasilitas peningkatan perputaran transaksi di masyarakat.

a. Tata kelola industri (*industry*)

Perencanaan dan tata kelola industri di daerah menjadi sangat penting sebagai faktor kunci perputaran roda ekonomi. Setiap daerah harus menentukan *leading sector* yang harus diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi. Sektor industri yang dimaksud adalah industri primer, sekunder dan tersier. Di Kabupaten Bogor, industri primer atau industri yang belum memiliki nilai tambah antara lain dibidang pertanian (lumbung padi) dan perikanan air tawar. Untuk industri sekunder meliputi industri fashion, industri batik, industri kerajinan, sedangkan industri tersier meliputi industri pariwisata, digital animasi, perfilman, aplikasi dan kesenian.

b. Mewujudkan kesejahteraan rakyat (*welfare*)

Indikator dari kesejahteraan ekonomi dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu peningkatan pendapatan rumah tangga (*income*), peningkatan penyerapan angkatan kerja (*employment*) dan berkembangnya pemberdayaan ekonomi

masyarakat....

masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat biasa terjadi apabila sektor industri tumbuh dengan baik dan ekosistem bisnis mendukung kreativitas masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya.

c. Membangun ekosistem transaksi (*transaction*)

Pemerintah harus menyiapkan infrastruktur transaksi melalui tersedianya ekosistem lembaga keuangan yang mendukung baik dari perbankan maupun non-bank (*finance*), dan infrastruktur *less-cash* untuk menciptakan transaksi non-tunai yang mudah, cepat, nyaman dan aman (*e-payment*). Disamping itu, ekosistem perdagangan dengan memanfaatkan teknologi internet perlu didorong untuk menumbuhkan sektor industri melalui perdagangan berbasis *online* (*e-commerce*).

Kondisi Eksisting



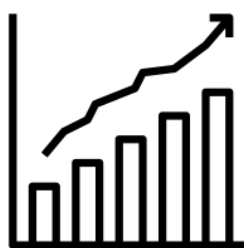
Jumlah orang yang terangkut angkutan umum sepanjang tahun 2015 menjadi 17.882.013 jiwa.



Pertumbuhan jumlah orang/barang melalui terminal di Kabupaten Bogor tahun 2015 menjadi 626.642.



Hingga tahun 2013 jumlah panjang jalan nasional adalah sepanjang 124,85 km dengan jumlah ruas 11, panjang jalan provinsi adalah sepanjang 121,820 km dengan jumlah ruas 10 serta jalan kabupaten adalah sepanjang 1.748,915 km dengan jumlah ruas sebanyak 458 ruas. Untuk jalan lingkungan permukiman yang meliputi jalan perumahan dan jalan desa dari data pemetaan sepanjang 6.662,89 km dengan jumlah panjang jalan yang terdata sepanjang 1.038,17 km dengan jumlah ruas 505 ruas.



Inflasi di Kabupaten Bogor selama tahun 2014-2018 diprediksi mencapai kisaran 3,5-5,5 persen

NTP di Kabupaten Bogor pada tahun 2014-2018 diprediksi antara 104,60-117,56. Peningkatan ini menunjukkan peningkatnya kesejahteraan para petani di Kabupaten Bogor. (Bappeda 2018)



Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bogor diprediksi sekitar 8 persen. (BPS 2018)

Inisiatif...



GOR Pakansari



Situ Front City



transit oriental development Sentul



Masterplan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP).

Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah



Inisiatif dan Strategi

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi;
- Meningkatkan ketersediaan energi dan mengembangkan sumber energi alternatif terbarukan;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dan investasi swasta demi peningkatan kuantitas dan kualitas ketersediaan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bogor;
- Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, berupa terminal, fasilitas lalu-lintas dan sarana perhubungan lainnya;
- Optimalisasi manajemen transportasi, pengaturan moda transportasi angkutan umum dan angkutan massal serta peningkatan upaya-upaya untuk keselamatan penggunasarana transportasi;
- Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas pangan daerah;
- Meningkatkan akses pangan bagi masyarakat;
- Mengembangkan sentra komoditas unggulan serta agribisnis pertanian dan perikanan;
- Meningkatkan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
- Mengembangkan investasi sesuai dengan potensi sumber daya daerah;
- Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan;
- Memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- Mengembangkan pasar dalam negeri dan luar negeri;
- Memberdayakan industri kecil dan menengah;
- Pengembangan pengelolaan BUMD dan PD yang berdaya saing.

3.6 Smart Branding

Smart branding yaitu peningkatan daya saing daerah secara cerdas. *Smart branding* terdiri dari:

- a. *Tourism*, yaitu membangun ekosistem pariwisata;
- b. *Business*, yaitu membangun daya saing usaha (TTI dan industri kreatif);
- c. *City Appearance*, yaitu penataan wajah kota.

Sasaran *smart branding* adalah peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.



Gambar 8. Kerangka Kerja *Smart Branding*

Tujuan dari *smart branding* antara lain:

- 1) untuk mempercantik daerah agar menarik bagi pihak-pihak untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan baik dalam *smart city readiness* maupun membangun *smart city* pada elemen-elemen tertentu;
- 2) untuk meningkatkan *value* sebuah kota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena meningkatkan aktivitas ekonomi, bisnis, sosial dan budaya;
- 3) untuk membangun konsep pemasaran kota melalui pengembangan nilai, metode dan perangkat pembangunan daerah;
- 4) Untuk membangun strategi agar dapat keluar dari masalah yang dihadapi daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Cakupan....

Cakupan *smart branding* meliputi tiga dimensi, yaitu:

a. *Branding* pariwisata (*tourism*)

Dalam bidang pariwisata, program *Smart city Branding* harus mencakup perencanaan dan program pembangunan untuk memajukan potensi wisata daerah baik dalam hal lokasi ataupun tujuan wisata (*destination*), suasana dan lingkungan yang nyaman (*amenities*) dan peningkatan budaya melayani (*hospitalities*), ketiga hal tersebut memiliki konsekuensi yang luas dalam mewujudkan iklim pariwisata yang terintegrasi antara *nature*, *infrastruktur* dan *culture* pariwisata.

b. *Branding* bisnis (*business*)

Pada dimensi bisnis dapat ditujukan untuk menciptakan iklim bisnis (*business sphere*) yang kondusif bagi pelaku bisnis untuk memajukan perekonomian daerah dalam bidang perdagangan (*trade*), meningkatkan investasi daerah (*investment*), dan mendorong pertumbuhan industri kreatif (*creative*). Tujuan ketiganya adalah untuk meningkatkan daya saing daerah di bidang perdagangan, investasi dan industri kreatif yang ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. *Branding* wajah kota (*appearance*)

Pada dimensi wajah kota (*city appearance*) harus menyertakan perencanaan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang encerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional.

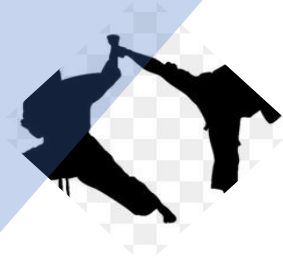
Tahapan yang dapat dilakukan dalam *smart city branding* oleh suatu daerah, yaitu :

- 1) Penilaian kota (*city assesment*);
- 2) Penyusunan *masterplan* pembangunan kota (*masterplan*);
- 3) Penyusunan panduan *city branding* (*brand guideline*);
- 4) Penyusunan panduan program aktivasi (*activation plan*);
- 5) Menyiapkan pusat investasi *smart city* (*smart city investment center*).

Kondisi Eksisting



Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Di Kampung Adat Wilayah Kabupaten Bogor. (DISBUDPAR 2018)



Pelestarian Seni Pencak Silat Cimande. (DISBUDPAR 2018)



Festival Kaulinan Urang Lembur (DISBUDPAR 2018)



BOGOR WONDERFUL GOLF TOURNAMENT AND TOURISM 2018

Inisiatif...

Inisiatif dan Strategi

- Peningkatan daya tarik wisata, destinasi dan pemasaran pariwisata melalui pengembangan produk wisata yang memiliki kearifan dan kekhasan lokal didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai;
- Peningkatan pelayanan pariwisata dengan menjaga dan memelihara kualitas sumber daya alam dan lingkungan untuk meningkatkan aktivitas wisata alam yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat, difokuskan pada Peningkatan objek dan daya tarik wisata serta manajemen pelayanan pariwisata
- Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan Pariwisata;
- Penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah tahunan;
- Penumbuhan budaya inovatif dan kreatif yang positif disertai dengan pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat yang dilandasi oleh “Prayoga, Tohaga, Sayaga” (mengutamakan persatuan, kekokohan dan kekuatan pendirian serta perjuangan);
- Pemantapan ketahanan budaya masyarakat Kabupaten Bogor;
- Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah, kearifan lokal serta nilai-nilai sejarah dan kejuangan Bangsa;
- Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai sejarah, tradisi dan kepurbakalaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun obyek wisata budaya; serta
- Peningkatan kualitas kesenian daerah, komunitas beserta seni-budaya dan penguatan keanekaragaman seni budaya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.



Peningkatan Kapasitas Desa Wisata Malasari. (DISBUDPAR 2018)

GEOPARK Pongkor. (DISBUDPAR 2018)



Fetival Budaya Daerah Helaran. (DISBUDPAR 2018)

Sistem Informasi Tataruang Terintegrasi. (DISBUDPAR 2018)



Mojang Jajaka Kabupate Bogor. (DISBUDPAR 2018)

INOVASI DAERAH

A. *Situ Front City of Cibinong Raya*

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas situ-situ di Cibinong Raya;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan situ;
3. Mengarahkan pembangunan dan *layout* kota untuk berorientasi situ;
4. Meningkatkan daya tarik situ sebagai wajah dan citra kota Cibinong Raya.

B. Anugrah Pancaniti Apik

1. Mendorong Pemerintahan Desa dapat menyusun perencanaan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Desa;
2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan (Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
3. Meningkatkan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Meningkatkan kapasitas Camat dan perangkat Kecamatan sebagai pembina dan pengawas pembangunan Desa.

C. Pelatihan Pemetaan *Drone* Desa

1. Merakit dan mengoperasikan pesawat tanpa awak atau *drone*;
2. Mengaplikasikan metode riset sosial dalam analisis spasial;
3. Mengaplikasikan metode interpretasi dan analisis data spasial desa;
4. Membuat film atau video dokumenter untuk promosi wilayah;
5. Menyediakan data dan informasi dalam menyusun perencanaan pembangunan desa.

D. Gerakan Pembangunan menuju Keluarga Hidup Layak

1. Menjadikan peserta PKH sebagai sasaran inti penanggulangan kemiskinan;
2. Mengkoordinir lokasi dan fokus program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terpadu dengan membentuk Tim Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan (11 SKPD);
3. Membangun aplikasi manajemen penanggulangan kemiskinan melalui *SMS Gateway*;
4. Membangun lembaga usaha ekonomi dari Tim Pendamping PKH dan TKSK guna memotong mata rantai pemasaran;

5. Konsep....

5. Konsep "1 RTSM 1 Sarjana" dengan mendorong para pendamping PKH untuk memotivasi anak RTSM yang akan mengikuti ujian/lulus SLTA agar melanjutkan kuliah.

E. Desa Mengajar

1. Gerakan kolektif, kerjasama antara seluruh komponen yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha; serta
2. Mengoptimalkan semua sumber daya pendidikan yang tersedia di masyarakat/di tingkat desa.

RENCANA AKSI

1. *SMARTCITY* KABUPATEN BOGOR

a. Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan *Smart City* Daerah.

- 1) Rencana pengembangan kebijakan dibuat peraturan Bupati tentang *Smart City* Kabupaten Bogor;
- 2) Pelaksanaan kegiatan terpadu dan terintegrasi antar OPD dalam mengembangkan *Smart Village*.

b. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung *Smart City*.

- 1) Revitalisasi *data center* Kabupaten Bogor;
- 2) Pembangunan Jaringan *wifi* di lokasi layanan publik;
- 3) Pembangunan *Smart Room* sebagai ruang kontrol bagi pimpinan dalam mengendalikan pelaksanaan *smart city* di Kabupaten Bogor.

c. Rencana Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung *Smart City*.

- 1) Aplikasi *dashboard* kabupaten Bogor;
- 2) Aplikasi Layanan Administrasi Desa.

d. Rencana Penguatan Literasi *Smart City* Daerah.

2. Kesiapan Dinas Komunikasi dan Informatika

a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor berdiri pada tahun 2009 dengan tugas pokok mengelola Komunikasi dan informatika di Kabupaten Bogor. Dalam menjalankan fungsinya, Diskominfo terbagi menjadi 3 bidang yaitu bidang yang menangani komunikasi publik, bidang yang menangani teknologi informasi dan bidang yang menangani Layanan Komunikasi dan Informatika.

b. Pada tahun 2014, Dinas Komunikasi membangun infrastruktur jaringan intranet dengan teknologi fiber optik untuk menghubungkan 38 gedung Perangkat Daerah. Pada Tahun 2015 dibangun jaringan internet untuk kecamatan dan dengan teknologi *tunneling*. Pada Tahun 2016 dibangun jaringan internet untuk 17 Kelurahan dan 101 Puskesmas di Kabupaten Bogor.

c. Selain infrastruktur jaringan, Kabupaten Bogor juga telah membangun *Data Center* sebagai sarana menyimpan aplikasi dan data milik pemerintah Kabupaten Bogor. Pada saat ini telah terbangun 117 sistem informasi baik berbasis *desktop* maupun *web* yang digunakan dalam mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan dan

Pelayanan....

Pelayanan publik. Akan tetapi pada saat ini, belum semua aplikasi tersimpan di *data center*. Penyimpanan aplikasi dilaksanakan dengan dua cara yaitu *Collocation* dan *hosting* aplikasi. *Collocation* yaitu pemilik aplikasi menyimpan *server* ke *data center*. Sedangkan dengan cara *hosting* adalah aplikasi disimpan di *server* diskominfo dengan teknologi *virtual server*.

- d. Infrastruktur jaringan dan *data center* Kabupaten Bogor dilengkapi dengan sistem keamanan berupa *firewall* dan anti virus. Dengan demikian diharapkan semua sistem informasi yang ada akan terlindungi dari serangan-serangan yang tidak bertanggungjawab.
- e. Selain infrastruktur jaringan dan *data center*, kabupaten Bogor juga telah membangun infrastruktur diantaranya :
 - 1) Menara;
 - 2) Studio radio dan tv;
 - 3) Pemancar di hambalang;
 - 4) Ruang Training;
 - 5) *Videotron*;
 - 6) *Digital Signage player*.

PETA JALAN SMART CITY KABUPATEN BOGOR

Peta jalan yang dijelaskan pada bagian ini merupakan rambu-rambu inisiatif program pengembangan *smart city* dalam kurun jagka Waktu Pendek atau menengah. Konteks pengembangan dilakukan dengan acuan RPJMD 2019-2023, sebagai perwujudan pencapaian visi dan misi pembangunan di kabupaten Bogor. Peta jalan ini dilengkapi dengan Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Kinerja/Program, Indikasi Kegiatan, Output, Capaian Kinerja Program, Strategi, Bidang Urusan dan Perangkat Dinas adapun uraiannya seperti tersaji pada tabel dibawah ini:

1. *Smart Governance.*

Sasaran *smart governance* yaitu mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PD
							2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang sinergis.	Keralasan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan perencanaan Kabupaten Bogor.	Program Perencanaan Imfrastruktur dan Pengembangan Wilayah.	Tersedianya Bahan Dokumen Perencanaan Sektor Imfrastruktur dan Pengembangan Wilayah.	Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Jaringan Kabupaten Bogor.	Tersedianya <i>Software ArcGIS Server</i> sebagai Pendukung Optimalisasi dan Efektivitas Penenggaraan Informasi <i>Geospasial</i> serta pengembangan sistem jaringan inprastruktur <i>geospasial</i> Kab. Bogor.	3 PD	3 PD	3 PD	3 PD	3 PD		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Perencanaan.	BAPPEDA.
2	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Kajian Inovasi.	Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam pembangunan.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam pembangunan.	Penguatan Jaringan Penelitian.	Meningkatnya Jaringan Penelitian di Kab. Bogor.	10%	10%	10%	10%	10%		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Perencanaan.	BAPPEDA.
3	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembiayaan pembangunan.	Keselarasan dokumen perencanaan dan pembiayaan Kabupaten Bogor.	Program Perencanaan Pembangunan.	Tersedianya bahan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor.	Pembangunan dan pengembangan SIMRAL.	Meningkatnya efisiensi dan egektivitas perencanaan dan pembiayaan pembangunan.	50 %	70%	80%	905	100 %		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.		BAPPEDA.
4	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil.	Survey Kepuasan Masyarakat.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	Rasio Peningkatan Kerjasama Pemanfaatan data.	Pemanfaatan Data Kependudukan.	Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Yang Terlaksana.	5	5	5	5	5		Mengembangkan pelayanan adminduk.	E-Gov.	Disdukcapil.
5	Terwujudnya tertib administrasi	cakupan penerbitan akte.	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil.	Rasio Penerbitan Akte.	Pengelolaan sistem informasi Kebijakan pemerintah (Peraturan Daerah dan	Jumlah Akte Kelahiran yang terbit melalui masyarakat.	50000	70000	75000	80000	85000		Mengembangkan pelayanan adminduk.	E-Gov.	Disdukcapil.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PD
							2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	kependudukan dan catatan sipil.				Peraturan Kepala Daerah yang dapat diakses masyarakat.										
6	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil.	Terwujudnya Kinerja Penataan Administrasi Kependudukan.	Program Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan.	Rasio peningkatan sosialisasi administrasi kependudukan.	Sosialisasi Pelayanan Kependudukan.	Jumlah sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Catatan Sipil.	64	70	70	70	70		Mengembangkan pelayanan adminduk.	E-Gov.	Disdukcapil.
7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan melalui Publikasi Kinerja.	Persentase pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi dan sistem informasi.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENCAPAIAN KINERJA.	Jumlah Publikasi penyelenggaraan kinerja pemerintahan dengan sistem jaringan elektronik terpadu kecamatan (Jeruk Online).	Pengembangan sistem jaringan elektronik terpadu kecamatan (Jeruk Online).	Jumlah sistem informasi jaringan elektronik.	80%	100%					Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	TIK.	Kecamatan Cijeruk.
8	Pelayanan Informasi dan Konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeliarga Bagi Remaja.	Terbentuknya kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja Tingkat Desa.	Pembentukan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R).	Jumlah Desa Yang memiliki Kelompok PIK R (9 Desa).	Jumlah Desa memiliki Kelompok PIK R Tumbuh, Tegak dan Tegar.	Jumlah Kelompok PIK R sesuai Klasifikasi (Strata) 9 Desa.	9	9					Meningkatkan wawasan kebangsaan dan pembinaan politik.	Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat.	Kecamatan Babakan Madang.
9	Meningkatnya profesionalisme serta ketrampilan aparatur pengawasan.	Jumlah Auditor.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	Persentase penyusunan Penerbitan Penilaian angka kredit.	Implementasi sistem Manajemen penyusunan DUPAK ,Penerbitan Penilaian angka kredit (aplikasi SIMPAK).	Dokumen DUPAK.PAK,Arsip Elektronik dan Database Angka Kredit Auditor.	100	100	100	100	100		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	E Government.	Inspektorat.
10	Meningkatnya profesionalisme serta ketrampilan aparatur pengawasan.	Jumlah P2UPD.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	Persentase penyusunan Penerbitan Penilaian angka kredit dan penyimpanan Data P2UPD.	Implementasi sistem Manajemen penyusunan DUPAK ,Penerbitan Penilaian angka kredit (aplikasi SIMPAK).	Dokumen DUPAK.PAK,Arsip Elektronik dan Database Angka Kredit Auditor.	100	100	100	100	100		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	E Government.	Inspektorat.
11	Meningkatnya Kapabilitas APIP.	Level kapabilitas APIP.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	Nilai akuntabilitas kinerja.	Pengelolaan sistem manajemen pengawasan (Aplikasi SIMWAS).	Terwujudnya pengawasan intern yang efektif dan profesional dalam meningkatkan tata kelola pemerintah Kab.Bogor yang baik.	100	100	100	100	100		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	E Government.	Inspektorat.
12	Meningkatnya implementasi sistem pengendalian intern.	Level maturitas SPIP.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	Nilai akuntabilitas kinerja.	Pengelolaan sistem manajemen pengawasan (E-SAKIP).	Database dokumen pelaporan tiap OPD(Renja, Renstra, Evkin,lakip,IKU).	100	100	100	100	100		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	E Government.	Inspektorat.
13	Meningkatnya pengelolaan pemerintahandi Desa berbasis teknologi informasi.	Cakupan pengelolaan pemerintahan desa yang menggunakan teknologi Sistem Informasi.	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.	Cakupan Pemerintahan desa yang memanfaatkan Teknologi Informasi.	Implementasi Sistem Informasi layanan administrasi Desa.	Jumlah Desa yang mempergunakan Sisten Informasi dalam menjalankan pemerintahan.	75	100	100	137			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	E-Government.	

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PD	
							2019	2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
14	Tersedianya data dan informasi yang akurat dan <i>real time</i> untuk menentukan kebijakan.	Tersedianya <i>dashboard</i> aplikasi lintas OPD yang terintegrasi.	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.	Cakupan Sistem informasi lintas OPD Kabupaten Bogor yang terintegrasi.	Pembangunan Sistem Informasi pendukung <i>smart City</i> .	Jumlah aplikasi terintegasi.	2	3	3	3	3		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	<i>E-government</i> .	Diskominfo.	
15	Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif 1). Meningkatnya Kualitas Penataan SDM Aparatur.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 1). Persentase Penataan ASN sesuai formasi dan kebutuhan.	Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi data.	persentase pemenuhan ASN sesuai dengan penetapan formasi ASN.	Perencanaan dan Pengadaan Pegawai ASN berbasis CAT.	%		72,04	72,04	72,04	72,04	1). Penguatan kebijakan dan implementasi sistem rekrutmen. 2). Pengembangan aplikasi kepegawaian berbasis teknologi informasi. 3). Pendistribusian dan penataan ASN sesuai hasil pemetaan. 4). Penguatan kebijakan dan implementasi sistem promosi secara transparan dan berbasis kompetensi.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Sub Bid Pengadaan, Pemberhentian Aparatur Sipil Negara.	BKPP.	
					Pengelolaan Administrasi Pensiun ASN.	%		72,04	72,04	72,04	72,04					
					Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai.	%		72,04	72,04	72,04	72,04					
					Persentase akurasi data kepegawaian.	Penguatan Sistem Informasi dan Pengelolaan database kepegawaian.	%		72,04	72,04	72,04					72,04
					Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi.	Pemindahan ASN.	%		72,04	72,04	72,04					72,04
					Persentase Kenaikan Pangkat Tepat Waktu.	Pelayanan Kenaikan Pangkat.	%		72,04	72,04	72,04					72,04
					Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada Pemerintah Kab Bogor.	Penempatan ASN.	%		72,04	72,04	72,04					72,04
					Jumlah jabatan administrasi pada Pemerintah Kab Bogor.	Pengembangan Karir ASN.	%		72,04	72,04	72,04					72,04
	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada Pemerintah Kab Bogor.		%		72,04	72,04	72,04	72,04								
16	2). Meningkatnya profesionalisme ASN.	2). Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan.	Pelatihan Kepemimpinan.	%	11	9,68	10,64	11,71	12,88	5). Peningkatan pendidikan dan pelatihan berbasis kualifikasi dan kompetensi.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Sub Bid Pendidikan, Pelatihan dan Penjurangan.	BKPP.	
				Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal.	Pendidikan Penjurangan dan Pelatihan Manajerial.	%	11	9,68	10,64	11,71	12,88					
				Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural.	Tugas Belajar dan Izin Belajar.	%	11	9,68	10,64	11,71	12,88					
					Pendidikan dan Pelatihan Teknis.	%	11	9,68	10,64	11,71	12,88					
					Pendidikan dan Pelatihan Substantif Manajerial.	%	11	9,68	10,64	11,71	12,88					
					Pendidikan dan Pelatihan Fungsional.	%	11	9,68	10,64	11,71	12,88					
					3). Persentase ASN yang mempunyai penilaian prestasi kerja minimal Baik.	Program Penyelenggaraan Peningkatan disiplin, penilaian kinerja serta kesejahteraan ASN.	Persentase pegawai ASN Pemkab Bogor yang mempunyai nilai SKP Minimal Baik.	Penegakan Disiplin ASN.	%	85,01	85,01					85,01

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PD
							2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												manajemen kinerja pegawai.			
				Persentase pemberian penghargaan tanda jasa bagi pegawai ASN yang memenuhi persyaratan.	Pemberian Penghargaan tanda jasa Bagi ASN.	%									
				Penetapan pemberian penghargaan kinerja pegawai yang objektif, transparan dan akuntabel.	Pengelolaan Evaluasi Kinerja ASN.	%								Sub Bid penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.	
					Pemberian Kesejahteraan ASN.	%									

2. *Smart Living*

Sasaran *smart living* yaitu mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	Arah Kebijakan	BIDANG URUSAN	PD
							2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatnya sarana dan prasarana dasar perumahan dan kawasan permukiman.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni.	Pengembangan Perumahan.	Cakupan Ketersediaan Rumah Tidak Layak Huni.	Rehabilitasi rumah tidak layak huni.	40 kecamatan Yang dilaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni.	83,00%	84,69%	86,25%	87,64%	88,84%		Rehabilitasi rumah tidak layak huni dan penataan kawasan permukiman kumuh.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.	DPKPP.
2	Terwujudnya Pelayanan rujukan masyarakat miskin.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.	Program pelayanan BLUD.	Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan.	Penyediaan darah di daerah kabupaten Bogor di bagian Timur, sulit untuk menjangkau PMI Cibinong, untuk itu RSUD Cileungsi bekerja sama dengan RS swasta lainnya untuk menyediakan labu darah yang diperlukan dengan sistem manajemen informasinya.	Sisarah (Sistem Informasi Ketersediaan Darah).	Aplikasi.	Regulasi.	Uji Coba.	Implementasi.	Implementasi.	Penyediaan sistem IT, tenaga dan sarana yang mencukupi untuk menunjang kegiatan kebutuhan darah di wilayah Kabupaten Bogor bagian Timur.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.	<i>E Living.</i>	RSUD Cileungsi.
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Program Pelayanan Medik RSUD.	Tercapainya peningkatan standar mutu tata kelola pelayanan medik dengan puskesmas.	Konsultasi dan Koordinasi dengan dokter spesialis penyakit jantung di Rumah Sakit (<i>Telemedicine</i>).	Terkonsultasikan a kasus penyakit jantung di puskesmas dengan dokter spesialis.	Aplikasi ChatMe (Ciawi <i>Heart N Trauma Medical Emergency</i>).	Koordinasi dengan Instansi terkait dan pendampingan.	Implementasi.	Evaluasi.	Pengembangan Aplikasi.	- Adanya Mou antara RSUD dengan Puskesmas.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.	Bidang medik.	RSUD Ciawi.
4	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.	Meningkatkan efisiensi biaya pelayanan.	Program Pelayanan Medik RSUD.	Termonitornya mutu dan biaya pelayanan pasien.	Termonitornya biaya pelayanan pasien, Termonitornya mutu layanan pasien.	Meningkatnya efisiensi biaya pasien dengan diagnosa tunggal : gagal jantung, DHF, Stemi, Gagal Ginjal, Tipoid.	Perencanaan dan Pembuatan Aplikasi Si Dalimu Daliya.	Pendampingan, uji coba Aplikasi dan Implementasi.	Implementasi.	Evaluasi dan Pengembangan Jenis Diagnosa Tunggal.	Pendampingan dan Uji Coba dari penambahan Jenis Diagnosa Tunggal.	Monitoring, Evaluasi dan waskat dari manajemen.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.	Bidang medik.	RSUD Ciawi.
5	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.	Aplikasi Sistem Informasi Tempat Tidur Ruangan dan Kamar (Si TEGAR).	Terlaksananya Aplikasi Sistem Rujukan pasien di Kabupaten Bogor yang terintegrasi dengan 4 RSUD.	75	90	100	100	100	- Adanya Kebijakan /Regulasi yang mendasari terlaksananya kegiatan (SK Bupati dan SK Kepala Dinas).	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.	Bidang Pelayanan Kesehatan.	Dinas Kesehatan.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	Arah Kebijakan	BIDANG URUSAN	PD
							2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jiwa/ RS Paru/ RS. Mata.												
6	Sistem Cepat Pelayanan Online Terpadu (SI CEPOT).	a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM petugas rumah Sakitb. Meningkatkan pengetahuan informasi teknologi masyarakat kabupaten bogor b. Meningkatkan pengetahuan informasi teknologi masyarakat kabupaten bogor c. Tersediannya sarana dan prasarana yang mendukung teknologi yang terintegrasi d. Tertatanya alur pelayanan pasien yang terintegrasi dengan SIM RS dan layanan on line e. Meningkatkan kuantitas masyarakat kabupaten bogor yang menggunakan sarana dan prasarana	Pelayanan kesehatan.	a. Kinerja keuangan b. Kinerja mutu pelayanan c. Kinerja operasional.	a. Rerata kunjungan pasien b. Perbandingan kunjungan pasien baru dan lama c. BOR, LOS, TOI, NDR, GDR d. Rerata kunjungan rajal perhari e. Rerata kunjungan IGD f. Rerata operasi perhari g. Rerata rehabilitasi medis perhari h. Pemeriksaan RO i. Pemeriksaan Laboratorium.	Terlaksanannya tata kelola pelayanan pasien terintegrasi dengan SIM RS.	Mempersiapkan pendaftaran on line terintegrasi dengan SIM RS di rawat jalan, pengadaan hardware, shoftware, server, aplikasi, tenaga IT progremmer yang kompeten.	proses ujicoba pendaftan rawat jalan on line terintegrasi dgn SIMRS secara keseluruhan dari pasien mendaftarkan lewat online sudah sampai nama pasiennya terhubung.	sudah berjalan pendaftarn on line terintegrasi dengan SIMRS sudah mulai berjalan.	sudah dapat di kembangkan pendaftaran on line secara keseluruhan termasuk sudah bias menampilkan estimasi harga yang harus di keluarkan untuk pasien tunai.	sudah berjalan system penfadtaran online melalui seluler dan pendaftan melalui kiostel di RS.	1. Menetapkan tujuan yang lebih spesifik yaitu peningkatan pelayanan kesehatan kepada pasien yang berorientasi kepada peningkatan permorfa rumah sakit, kualitas sumber. 2. Membudayakan organisasi informasi yang akurat mengenai kebutuhan dari setiap bagian yang ada di rumah sakit , serta dapat mengumpun balikan dari hasil atau kebutuhan yang di perlukan 3. Diadakan pelatihan kepada petugas. 4. Memfasilitasi program kesehatan unggulan 5. Melakukan perbaikan terus menerus.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.	Rumah sakit.	RSUD Cibinong.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	Arah Kebijakan	BIDANG URUSAN	PD
							2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		rumah sakit secara on line f. Terpromosinya pelayanan pasien on line yang terpadu g. Terawasinya kegiatan pelayanan pasien terpadu secara on line h. Terciptanya tertib pada masyarakat dan petugas rumah sakit i. Terjaganya standar pelayanan, mutu pelayanan j. Mempertahankan akreditasi paripurna.													
7	Sistem Merujuk Ambulan Ke RS Sekabupaten Bogor (SI MAK RS SEKAB).	a. SDM yang memiliki kompetensi b. Sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan c. Standar pelayanan oprasional sesuai dengan ketentuan d. Terpromosinya pelayanan ambulance yang terpadu e. Terawasinya kegiatan pelayanan ambulance terpadu yang terinegrasi pelayanan IGD.	Pelayanan ambulance terpadu memiliki fasilitas mini ICU dan IGD yang berintegrasi dengan SIMRS.	a. Kinerja keuangan b. Kinerja mutu pelayanan c. Kinerja operasional.	a. pasien yang dirujuk ke RSUD cibinong dan rs lain b. Kebutuhan pasien yang membutuhkan ambulance c. Data diagnose penyakit kegawat daruratan terbanyak (10 penyakit terbanyak).	Pelayanan kesehatan pada ambulance yang berorientasi pada tindakan kegawatdaruratan yang memilikifasilitas yang sudah terintegrasi dengan pelayanan IGD dan berinegrasi dengan SIMRS.	mempersiapkan sarana dan prasarana, mempersiapkan SDM.	merencanakan aplikasi , pengadaan kebutuhan yang menunjang.	ujicoba kegiatan.	pelaksanaan kegiatan.	sudah siap dengan pengembangan.	a. pengembangan pelayanan RS dengan meningkatkan performars meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan program pendidikan dan pelatihan b. bekerjasama dengan fasilitas kesehatan yang ada di sekitarrs c. memberikan informasi kepada masyarakat melalui sosialisasi, leaflet , benner dan website d. bekerjasama dengan dinas kesehatan , diskominfo dan SKPD yang terkait dengan layanan masyarakat.	Menyediakan layanan Bogor Siaga.	Rumah sakit.	RSUD Cibinong.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	Arah Kebijakan	BIDANG URUSAN	PD
							2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Pembangunan <i>Intelligent Transport System</i> (ITS).	Meningkatkan keselamatan, ketertiban, kelancaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.	Manajemen rekayasa lalu lintas.	Pengembangan ITS (Sistem Kontrol Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).	Penanganan titik kemacetan di persimpangan maupun di ruas jalan.	Bertambahnya jumlah penanganan lokasi kemacetan.	20% (4 persimpangan, 2 ruas jalan).	25% (bertambah 4 persimpangan).	30% (bertambah 4 persimpangan).	35% (bertambah 4 persimpangan).	40% (bertambah 4 persimpangan).	Adanya kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bogor dengan pemerintah pusat dalam pembangunan ITS.	Menyelesaikan titik kemacetan.	Perhubungan.	DISHUB.
9	Terwujudnya pembangunan dan pengembangan transportasi yang selamat, tertib, lancar.	Meningkatkan kinerja pelayanan lalu lintas (v/c rasio).	Manajemen dan rekayasa lalu lintas.	Tersedianya kebutuhan fasilitas dan perlengkapan jalan.	Pemasangan fasilitas dan perlengkapan jalan.	Meningkatkan ketersediaan kebutuhan fasilitas dan perlengkapan jalan.	0.36	0.45	0.52	0.57	0.71	Penanganan kemacetan secara intens.	Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan.	Perhubungan.	DISHUB.
10	Terwujudnya pelayanan transportasi yang terintegrasi dan terjangkau.	Persentase layanan angkutan darat.	Program pengembangan sarana dan prasarana perhubungan.	Pengembangan sarana angkutan umum massal.	Kajian Kelembagaan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM), Pengadaan Bus Angkutan Massal, Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal, Penyusunan Detail Engineering.	terselenggaranya layanan angkutan umum massal.		60	65	70	75	Pengembangan sarana angkutan umum.	Meningkatkan kualitas angkutan massal.	Perhubungan.	DISHUB.
11	Desa Gunung Geulis sebagai Kawasan Eko Wisata yang dapat dikembangkan secara maksimal, yang bertujuan mensejahterakan masyarakat sekitarnya.	<i>Smart Village</i> .	Penataan Lingkungan Terpadu Gugeul's Park.	1. Tertatanya wilayah menjadi kawasan yang lebih bernilai ekonomi bebas lingkungan. 2. Meningkatnya kualitas SDM di bidang penanganan lingkungan dan bidang pariwisata 3. Infrastruktur dan aksesibilitas 4. Warga setempat yang trampil memproduksi makanan maupun kerajinan lokal. 5. Dukungan peralatan pertanian, bibit	1. Pengembangan wilayah menjadi kawasan wisata alam (ekowisata). 2. Pemanfaatan lahan pekarangan rumah 3. Pengelolaan sampah, bank sampah dan kreasi sampah daur ulang. 4. Pengendalian kekeringan, pembuatan lubang biopori, penataan sumber air (pipanisasi). 5. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM untuk mendukung	Terciptanya kawasan yang lebih bernilai ekonomi yang dapat dijadikan sebagai penunjang perbaikan ekonomi masyarakat sekitar.	50	70	80	90	100	1. Melibatkan sepenuhnya masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolannya. 2. Ekowisata berbasis masyarakat yang menitik beratkan peran aktif komunitas yang dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. 3. Meningkatkan kerjasama antara stakeholder dalam pengembangan dan pengelolaa lingkungan 4. Pengembangan kewirausahaan di bidang pariwisata bagi masyarakat lokal	mengembangkan pariwisata yang edukatif dan kreatif berbasis sumberdaya alam yang berkelanjutan.	e- Gov.	Kecamatan Sukaraja.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	Arah Kebijakan	BIDANG URUSAN	PD
							2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				tananaman, lahan untuk pembibitan, pupuk, pestisida dll	pelaksanaan dalam upaya penataan lingkungan dan pengembangan pariwisata.							4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM untuk mendukung pelaksanaan dalam upaya penataan lingkungan dan pengembangan pariwisata.			
				6. Pembentukan BUMDES di Desa Gunung Geulis .	6. Tersedianya sarana jalan dan transportasi yang memadai							5. Promosi/penyebarluasan informasi secara maksimal.			
				7. Tersedianya sarana prasarana pendukung berbasis digital.	7. Meningkatkan kuliner dan kerajinan lokal.										
					8. Tersedianya rumah pembibitan dan peralatan jahit.										
					9. Adanya Bumdes dengan mengangkat kearifan lokal										
					10. Tersedianya sarana prasarana/perangkat Sistikomunikasi Desa (Siskomdes) secara on line.										
12	Pengamanan Jalur Penyeberangan / di tempat - tempat keramaian seperti; pertigaan /perempatan lampu merah/jalan raya, sekolah-sekolah, pasar dan Rumah Sakit.	Pekerja , Anak Sekolah dan Pejalan Kaki.	Pengamanan Jalur (PAM JALUR).	Jumlah lokasi / titik pengamanan jalur yang ada di wilayah Kabupaten Bogor.	Pengembangan SDM anggota Satpol PP dan mengubah cara pandang masyarakat ke Satpol PP.	40 Kecamatan	5	10	20	30	40		Penataan kawasan perkotaan.	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.
13			Meningkatkan Perlindungan Lingkungan yang nyaman Kp. Palawijo Desa Cigudeg.	1.Lingkungan yang asri 2. Penyediaan Wifi Gratis 3. Taman Buku /Literasi	Penataan Taman Desa.		30	50	70	80	90		Penyediaan ruang terbuka hijau dan pemanfaatan ruang terbuka biru.		Kecamatan Cigudeg.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	Arah Kebijakan	BIDANG URUSAN	PD
							2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				4. Pusat Informasi Desa 5. Pusat jajan/ Kuliner 6. Menyediakan Toko Modern 7. Fasilitas Pakir Masuk dalam (PAD) 8. Adanya wisata Keluarga.											
14			Ketersediaan sarana prasarana umum.		Pembangunan Terminal Jonggol.	Pembangunan sarana prasarana transportasi umum.	0	50	65	80	100		Meningkatkan kualitas angkutan massal.		Kecamatan Jonggol.
15	Meningkatnya Penanganan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, penanganan distribusi dan cadangan pangan, Penanganan Konsumsi dan Pengankaragaman Pangan dan Penanganan Keamanan Pangan.	Penanganan Desa Rawan Pangan.	Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan.	- Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan - Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.	Ketersediaan stok gabah di penggilingan terutama pada saat musim paceklik dan menjelang hari besar keagamaan sangat mempengaruhi harga beras di pasar. Oleh karena itu Dinas Ketahanan Pangan membuat aplikasi untuk memudahkan petugas enumerator dalam melakukan pendataan stok gabah di penggilingan sehingga pemerintah daerah dapat secara cepat mengambil langkah-langkah dalam stabilitas harga beras.	SIGILI (Sistem Informasi Penggilingan).	Aplikasi.	Pengembangan dan Uji Coba.	Implementasi.	Implementasi.	Implementasi.	Penyediaan sistem IT, tenaga Survey (Enumerator) dan sarana yang mencukupi untuk menunjang kegiatan survey stok gabah di penggilingan.	Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah tanaman pangan, hortikultura, perkebunan.	Distribusi dan Cadangan Pangan.	Dinas Ketahanan Pangan.
16	Meningkatnya Penanganan Ketersediaan	Penanganan Desa Rawan Pangan.	Program Pengembangan Pengawasan,	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan.	Pola hidup sehat masyarakat saat ini semakin	B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman).	Aplikasi dan Uji Coba.	Implementasi.	Implementasi.	Implementasi.	Implementasi.	Penyediaan sistem IT yang dapat diakses melalui Smartphone sehingga	mendorong budaya konsumsi makanan bergizi.	Konsumsi dan Pengankaragaman Pangan.	Dinas Ketahanan Pangan.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	Arah Kebijakan	BIDANG URUSAN	PD
							2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	dan Kerawanan Pangan, penanganan distribusi dan cadangan pangan, Penanganan Konsumsi dan Pengankaragaman Pangan dan Penanganan Keamanan Pangan.		Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.		meningkat dan menjadi salah satu gaya hidup.oleh karena itu Dinas Ketahanan Pangan membuat aplikasi untuk mengatur Pola Konsumsi harian masyarakat dengan berbagai macam menu yang beragam, bergizi, seimbang dan aman sehingga masyarakat dapat hidup sehat. Tujuan akhir dari kegiatan ini adalah untuk mendukung peningkatan Skor PPH masyarakat.							aplikasi ini dapat digunakan oleh seluruh masyarakat.			

3. Smart Environment

Smart environment yaitu pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan yang cerdas.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PD
							2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatnya efisiensi Waktu Management Kebakaran.	Tercapainya Waktu <i>Respon time</i> .	"Pembangunan Sistem Informasi Pemadam Kebakaran (SIMPADAM)".	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.	Implementasi penanganan mitigasi kebakaran dan proteksi.	Tercapainya WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran).	4	7	10	13	16	melaksanakan Bimtek ke 6 Sektor, yaitu : leuwiliang, Cibinong, Ciomas, Parung, Cileungsi, Ciawi. Dan telah disediakan PC di setiap sektor berikut dengan operatornya.	Meningkatkan <i>respon time</i> penanggulangan bencana kebakaran .	Data Informasi.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN.
2		Pembangunan Pos Sektor Pemadam Kebakaran di setiap Kecamatan.	Memperkecil waktu tanggap <i>Respon time</i> (WMK) dari 30 menit menjadi 15 menit mulai dari diterimanya berita kebakaran di wilayah.			Tercapainya WMK (<i>Respon time</i>) Meminimalisir kerugian materi dan korban jiwa, Tersedianya sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran, Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam Kebakaran.	8	13	18	23	28		Meningkatkan <i>respon time</i> penanggulangan bencana kebakaran.		DINAS PEMADAM KEBAKARAN.
3		Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Kebakaran.	Pembentukan Satuan Balakar (Barisan Relawan Kebakaran) di 40 Kecamatan.			Adanya masyarakat sadar bencana kebakaran.	8	16	24	32	40		Membentuk desa tangguh bencana.		DINAS PEMADAM KEBAKARAN.
4			Pembentukan Saka Yuda Brama Jaya bekerja sama dengan Gerakan Pramuka Kab. Bogor disetiap kecamatan/ 1 sekolah.				8	16	24	32	40		Membentuk desa tangguh bencana.		DINAS PEMADAM KEBAKARAN.
5	Optimalisasi kendaraan Roda 4 dan 2 Unit Pemadam Kebakaran.	Meningkatkan kendaraan mobil unit Pemadam Kebakaran yang layak pakai.		Tersedianya anggaran yang maksimal.									Meningkatkan <i>respon time</i> penanggulangan bencana kebakaran .		

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PD
							2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Peningkatan Kapasitas Anggota Pemadam Kebakaran yang profesional.		Tersedianya anggaran yang maksimal.				8	16	24	32	40		Meningkatkan <i>respon time</i> penanggulangan bencana kebakaran.		
7	Meningkatkan mitigasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.	Persentase mitigasi bencana yang berhasil dilaksanakan.	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Alam.	Persentase mitigasi bencana yang berhasil dilaksanakan.	Mitigasi dan Pemantauan Daerah Rawan Bencana.	Kecamatan.	5	5	5	5	5	Meningkatkan kualitas pelayanan pencegahan terjadinya bencana.	Membentuk desa tangguh bencana.	PK.	BPBD.
					Kajian dan Perencanaan Penanggulangan Bencana Daerah.	Dokumen.	1	1	2	2	2				
					Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bagi Masyarakat, Pelaku Usaha.	Kegiatan.	3	3	3	3	3				
					Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bagi pegawai ASN.	Kegiatan.	3	3	3	3	3				
					Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Bencana.	Dokumen.	1	1	2	2	2				
					Monitoring dan Evaluasi peran serta pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam pengurangan risiko Bencana.	Kegiatan.	3	3	3	3	3				
8		Persentase desa siaga bencana.	Program Penanggulangan Desa Rawan Bencana Alam.	Persentase desa siaga bencana.	Pengembangan Budaya Sadar Bencana.	Kegiatan.	3	3	3	3	3	Meningkatkan pelayanan bencana yang berbasis masyarakat.	Membentuk desa tangguh bencana.	PK.	BPBD.
					Pembentukan dan Penguatan Desa Tangguh Bencana .	Desa.	2	2	2	2	2				

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PD
							2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Meningkatnya pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana.	Rata-rata waktu penanganan bencana alam.	Program Peningkatan Penanggulangan Bencana Alam.	Rata-rata waktu penanganan bencana alam.	Penanggulangan Kedaruratan Bencana.	Lokasi.	130	135	140	145	150	Mengoptimalkan pelayanan penanggulangan bencana dengan penguatan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan membuat kebijakan tentang tanggap darurat.	Meningkatkan <i>respon time</i> penanggulangan bencana.	RATIK.	BPBD.
					Penyediaan Tenaga TRC.	Orang.	70	70	70	70	70			RATIK.	BPBD.
					Monitoring dan evaluasi penanganan bencana.	Dokumen.	12	12	12	12	12			RATIK.	BPBD.
					Pendistribusian dan Penataan Logistik.	Lokasi.	130	135	140	145	150			RATIK.	BPBD.
					Pengadaan sarana prasarana tanggap darurat.	Item.	12	12	12	12	12			RATIK.	BPBD.
					Penyiapan logistik penanganan bencana.	Jenis.	4	4	4	4	4			RATIK.	BPBD.
					Penyelenggaraan Pusat Pengendalian Operasi Bencana (Pusdalops PB).	Bulan.	12	12	12	12	12			RATIK.	BPBD.
					Pengelolaan Pusat data dan Informasi Penanggulangan Bencana.	Dokumen.	12	12	12	12	12			RATIK.	BPBD.
10	Persentase pemulihan di daerah terkena bencana alam.	Program Pemulihan Pasca Bencana Alam.	Persentase pemulihan di daerah terkena bencana alam.	Pemulihan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Pasca Bencana Alam.	Dokumen.	3	3	3	3	3	Merelokasi dan merehabilitasi masyarakat yang terkena bencana .	Membentuk desa tangguh bencana.	RR.	BPBD.	
				Penyusunan Perencanaan Rehabilitasi Rekonstruksi bidang fisik.	Dokumen.	12	12	12	12	12			RR.	BPBD.	
				Monitoring dan evaluasi rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana.	Kejadian.	150	155	160	165	170			RR.	BPBD.	

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PD
							2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.	Dokumen.	1	1	1	1	1			RR..	BPBD.
11	Mewujudkan Kabupaten Bogor Bersih Sampah.	1. Peningkatan Penanganan Sampah 2. Peningkatan Pengurangan Sampah.	Program Pelayanan Pengelolaan Sampah.	1. Prosentase Penanganan Sampah 2. Prosentase Pengurangan Sampah.	Belum adanya monitoring secara real time dan mengetahui secara langsung keluhan masyarakat terkait pengelolaan sampah.	ATIS (Aplikasi Terpadu Informasi Sampah).	Aplikasi.	Regulasi.	Uji Coba.	Implementasi.	Implementasi.	Memonitoring secara real time reduksi sampah yang ada di TPS & Bank Sampah, mengetahui secara real jumlah partisipasi warga/nasabah bank sampah serta mengetahui secara langsung keluhan masyarakat terkait pengelolaan sampah.	Penyediaan sarana prasarana persampahan .	Lingkungan Hidup.	DLH.
			PROGRAM Pembinaan dan Pengawasan Langkah-langkah Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup.			Mengurangi Pencemaran Lingkungan Di Area Wilayah Pedesaan Maupun Perkotaan.	60%	75%	80%	90%	100%				Kecamatan Leuwisadeng.
			KEGIATAN Pembinaan dan Pengawasan Langkah-langkah Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup.			Dalam Upaya Mendukung Smart Village.	60%	75%	80%	90%	100%				Kecamatan Leuwisadeng.
			Pembentukan Bank Sampah TUNAS HARAPAN BERKAH KP. Paku Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng.				60%	75%	80%	90%	100%				Kecamatan Leuwisadeng.
12			Peningkatan Kinerja Kecamatan.		Pembangunan sarana publik.	Terbangunnya sarana publik yang nyaman.	100	100	100	100	100		Penyediaan ruang terbuka hijau dan pemanfaatan ruang terbuka biru.		Kecamatan Cijeruk.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PD
							2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					sub kegiatan Pemangunan taman tematik / technopark di lingkungan kantor.	Terbangunnya taman tematik / technopark.	50	75	90		100				Kecamatan Cijeruk.
					sub kegiatan Pemasangan akses internet.	Tersedianya jaringan internet / wifi di taman tematik.	100	100	100	100	100				Kecamatan Cijeruk.
					sub kegiatan Sosialisasi taman tematik.	Peningkatan partisipasi masyarakat.	100	100	100	100	100				Kecamatan Cijeruk.

4. Smart Society

Smart society merupakan gambaran dari masyarakat yang pintar, masyarakat yang semakin bergerak menuju ekosistem sosio-teknis di mana dimensi fisik dan virtual kehidupan yang lebih intens terjalin.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PD
							2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Quick Respon bagi Masyarakat Miskin, Terlantar yang Membutuhkan Pelayanan Kedaruratan, Penanggulangan dan Rehabilitasi Sosial baik dibidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Ekonomi melalui Sistem Rujukan Terpadu.	-Lansia Terlantar -Anak Terlantar -PMKS yang mengalami Ketertelantaran.	-Rehabilitasi Sosial PMKS.	-Tersedianya Anggaran -Tertanganinya PMKS Melalui Sistem Rujukan Terpadu.	-Jumlah-Lansia Terlantar -Anak Terlantar -PMKS yang mengalami Ketertelantaran.	Tertanganinya PMKS Tercapai.	100	100	100	100	100	Penyiapan Tim Reaksi Cepat.	Membangun Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Puskesmas tiap desa.	Society.	Dinsos.
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan sekolah (BOS).	Integrasi Sistem Pendataan dan Pelaporan.	Peningkatan dan pengembangan Sistem Aplikasi.	Jumlah sistem yang dikembangkan dan diintegrasikan.	Pengembangan dan integrasi aplikasi.	Terintegrasinya Sirkas, Sireal dan Dapodik.	3					Mengintegrasikan Sistem sehingga dapat membantu sekolah untuk menyajikan data yang akurat.	Meningkatkan kualitas pendidik dan siswa.	Pendidikan.	Dinas Pendidikan.
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan sekolah (BOS).	Meningkatnya kapasitas layanan sistem.	Peningkatan sarana dan prasarana.	Meningkatnya kemampuan layanan sistem.	Penambahan kemampuan server.	Jumlah Server.	3		2	2		Mengupayakan percepatan pengadaan/penambahan server.	Meningkatkan kualitas pendidik dan siswa.	Pendidikan.	Dinas Pendidikan.
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan sekolah (BOS).	Meningkatnya kapasitas pengelola keuangan sekolah.	Peningkatan SDM pengguna sistem.	Jumlah Kepala Sekolah, Bendahara dan Operator yang dilatih.	Bimtek pengelolaan keuangan berbasis IT.	Jumlah Kepala Sekolah, Bendahara dan Operator yang terlatih.	600	850	950	1.000	1.550	Menyelenggarakan Bimtek pengelolaan keuangan secara terpadu.	Meningkatkan kualitas pendidik dan siswa.	Pendidikan.	Dinas Pendidikan.
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan sekolah (BOS).	Integrasi Sistem Pelaporan.	Optimalisasi pemanfaatan sistem.	Jumlah sistem yang dikelola.	Koordinasi dan implementasi Integrasi sistem.	Jumlah sistem yang terintegrasi.		2	2	2		Mengintegrasikan sistem pelaporan sekolah dengan BPKAD, Kemdikbud.	Optimalisasi koordinasi dan pembinaan wilayah.	Pendidikan.	Dinas Pendidikan.
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan sekolah (BOS).	Meningkatnya jumlah belanja non tunai.	Peningkatan transaksi non tunai.	Meningkatnya jumlah sekolah yang menggunakan transaksi non tunai.	Sosialisasi sistem pembayaran non tunai.	Persentase jumlah belanja non tunai.	20	35	55	75	100	Mengintegrasikan sistem pelaporan sekolah dengan Bank penyalur dan penyedia jasa.	Optimalisasi koordinasi dan pembinaan wilayah.	Pendidikan.	Dinas Pendidikan.
7	Perangkat daerah dan Masyarakat.	Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip berbasis teknologi.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.	Prosentase sistem Informasi penyimpanan alih media arsip.	Implementasi sistem informasi penyimpanan alih media arsip (SIPALMA).	Jumlah Pengolahan Arsip Secara Elektronik Entry data arsip.	95000	100000	115000	130000	145000	Tersedianya akses dan jaringan PD Kecamatan dan desa.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah .	Wajib non pelayanan dasar.	DAPD.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PD
							2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemerintahan desa.	Persentase desa yang tertib pengelolaan keuangannya.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.	Jumlah desa yang dibina dalam penataan administrasi pemerintahan desa.	Pengembangan Sistem Informasi Desa.	Desa.	416	416	416	416	416	Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.	DPMD.
						Jumlah sistem informasi desa.	1	1	1	1	1				
						Jumlah peserta sosialisasi.	456	456	456	456	456				
						Jumlah materi sosialisasi.	1	1	1	1	1				
						Jumlah dokumen laporan akhir.	1	1	1	1	1				
						Jumlah dokumen KAK.	5	5	5	5	5				
							1	1	1	1	1				
9	Meningkatnya kesetaraan peran perempuan dalam kehidupan sosial dan Ekonomi.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta.	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Data Terpilah Gender.	pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan anak merupakan isu lintas sektor (<i>cross cutting issues</i>) dimana semua sektor pembangunan pusat dan daerah harus menjadi penggerak (<i>gender national machinery</i>) dengan memberikan perhatian Dan dukungan dlm proses pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan anak. dalam rangka keteraediaan data Dan Informasi <i>gender</i> maka di perlukan sebuah sistem aplikasi data Dan Informasi <i>gender</i> yg berbasis web Dan Android.	SIGADIS.	Aplikasi.	integrasi aplikasi ke geoportal Dan sisduk.	integrasi aplikasi untuk <i>supporting smart city</i> .	Implementasi	Implementasi	Peningkatan kapasitas <i>infrastructure IT</i> , penyediaan operator input data, tenaga admin, peningkatan kapasitas user SIGADIS.	Meningkatkan kompetensi perempuan.	Pemberdayaan Perempuan.	DP3AP2KB.
10	Perangkat daerah dan masyarakat.	Jumlah ahli media arsip statis menjadi arsip elektronik.	Peningkatan Pengelolaan, Pemeliharaan,	Prosentase sistem Informasi penyimpanan alih media arsip statis..	Pengolahan sistem informasi kearsipan Daerah (JKD) yang	Jumlah arsip statis yang bisa akses oleh masyarakat.	500	600	700	800	900	Tersedianya Simpul di PD	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan	Wajib non pelayanan dasar.	DAPD.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PD
							2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pelestarian dan Layanan Informasi Dokumen Arsip.		dapat diakses oleh masyarakat.							Kecamatan dan desa.	pemerintahan daerah.		
11	Masyarakat Kabupaten Bogor.	Terlayannya masyarakat kabupaten Bogor yang ingin membaca dan meminjam buku secara <i>online</i> .	Program Penyelenggaraan Pengembangan Pengelolaan Perpustakaan.	jumlah koleksi <i>e-book</i> yang tersedia.	Tersedianya Koleksi <i>e-book</i> dan terselenggaranya layanan perpustakaan digital.	jumlah masyarakat yang menggunakan layanan perpustakaan digital.		500	1000	1500	2000	Melakukan promosi dan sosialisasi layanan dan koleksi buku.	Mengembangkan Pelayanan Perpustakaan.	BIDANG PERPUSTAKAAN.	DAPD.

5. Smart Economy

Smart Economy memiliki definisi yang sangat luas terbagi menjadi tiga komponen yang berbeda: bagaimana Smart City mengubah perdagangan dan Smart City sebagai penggerak ekonomi.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PD
							2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Meningkatnya kinerja pemerintah dalam melakukan Penumbuhan Ekonomi Kerakyatan.		Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.	Jumlah Wira Usaha Baru.	Pembekalan/ Pelatihan/ Bimbingan Teknis diberbagai sektor Pengolahan makanan dan minuman, Fashion, Kerajinan.	Jumlah Para Wirusaha baru yang kreatif dan inovatif serta mampu berdaya saing.	50	50	50	50	50		Meningkatkan kualitas kelembagaan, akses bahan baku, pasar dan pembiayaan.	Wajib Non Pelayanan Dasar.	DISKOPUKM.
2	Masyarakat pelaku usaha peternakan dan perikanan.	Terkendalnya penyakit ternak dan ikan di kabupaten bogor.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak dan Ikan.	Terkendalnya Penyakit Ternak dan Ikan di 40 kecamatan.	Terkendalnya penyakit ternak dan ikan di Kabupaten Bogor.	Terciptanya rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi hasil ternak dan ikan.	80	80	80	85	100	1. Pemeriksaan PAH dan HPAH 2. Vaksinasi penyakit ternak 3. Penanganan penyakit ikan.	Penanganan penyakit ternak dan zoonosis..	1. Bidang Keswankes -mavet 2. Bidang Perikanan.	DISKANAK.
3			PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Industri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).			Pembuatan Vas Bunga dari Buah Pohon Manggis.	60%	75%	80%	90%	100%		Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah tanaman pangan, hortikultura, perkebunan.		Kecamatan Leuwiliang.
4			Kegiatan PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH.			Pemasaran Produk Minuman dari Buah Pala.	60%	75%	80%	90%	100%		Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah tanaman pangan, hortikultura, perkebunan.		Kecamatan Leuwiliang.
5			Peningkatan Kinerja Kecamatan.		Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perekonomian.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat.	100	100	100	100	100		Meningkatkan kualitas kelembagaan, akses bahan baku, pasar dan pembiayaan.		Kecamatan Cijeruk.
					Sub kegiatan Sosialisasi pengaruh budidaya	Peningkatan partisipasi masyarakat.	100						Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah tanaman		Kecamatan Cijeruk.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PD
							2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					tanaman kopi terhadap ekonomi.										
					Sub kegiatan bimbingan teknis budidaya kopi.	Peningkatan wawasan, pengetahuan serta minat masyarakat.	100	100	100	100	100		Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah tanaman pangan, hortikultura, perkebunan.	Kecamatan Cijeruk.	
6	Tersedianya produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang berkualitas dan berkelanjutan.	1. Produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan : - Produksi sayuran (Ton); - Produksi buah-buahan (Ton); - Produksi tanaman hias bunga (tangkai); - Produksi tanaman hias daun indah (pohon); - Produktivitas padi gogo (ku/ha); - Produktivitas palawija (ku/ha); - Produktivitas sayuran (ku/ha).	Program peningkatan produksi, produktivitas, dan nilai tambah tanaman pangan.	Produksi Tanaman Pangan :	Sistem basis data pertanian yang menggunakan teknologi informasi geospasial (sistem informasi geografis) secara online.	Sistem Informasi Monografi Pertanian (Aplikasi SIMONA).						Aplikasi ini menjadi bagian yang terintegrasi dengan simpul jaringan Kabupaten Bogor. Basis data dalam aplikasi SIMONA berupa sebaran nama dan lokasi kelompok tani, bantuan, penggunaan dan luas lahan, serta jenis komoditas maupun hal terkait lainnya.	Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah tanaman pangan, hortikultura, perkebunan.	Pertanian.	DISTANHORBUN
					Padi (Ton GKG).		417.839	418.884	419.931	420.981	420.981				
					Palawija (Ton).		151.715	151.867	152.019	152.171	152.171				
					Produktivitas Tanaman Pangan :										
					Produktivitas Padi Sawah (Ku/Ha).		55,20	55,78	56,36	56,94	56,94				
					Produktivitas Padi Gogo (Ku/Ha).		33,62	33,64	33,66	33,69	33,69				
					Produktivitas Palawija (Ku/Ha).		171,83	171,92	172,05	172,22	172,22				
					Persentase Nilai Tambah Tanaman Pangan (%).		1,43	1,43	1,43	1,43	1,43				
7	Optimalnya SIM Pelayanan Perizinan Terintegrasi.	Cakupan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Bogor.	Program penataan dan pengembangan	Penyediaan Pendukung Pelayanan Perizinan.	Pelaksanaan pelayanan perizinan di Kabupaten	OPTIMIS (Online Perizinan Transparan Informatif dan Sistematis).	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Penyediaan Sistem IT, tenaga dan sarana yang	Implementasi pelayanan perizinan transparan dan terpadu .	Ekonomi.	DPMPSTP.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PD
							2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			data perizinan dan penanaman modal.		Bogor yang sangat luas sehingga diperlukan suatu aplikasi yang dapat menunjang / mendukung kemudahan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan.							mencukupi untuk menunjang kegiatan.			
8	Perdagangan dalam negeri dan ekspor meningkat.	Nilai ekspor perdagangan (berdasarkan penerbitan SKA).	Program Pengembangan Perdagangan.	Jumlah Eksportir (berdasarkan registrasi SKA).	Pengembangan Ekspor Impor dan Promosi Perdagangan.	Tersedianya data dan nilai ekspor (berdasarkan penerbitan SKA).	318	328	348	368	388	Peningkatan kelompok pedagang/ usaha yang berdaya saing.	Meningkatkan kualitas kelembagaan, akses bahan baku, pasar dan pembiayaan .	Perdagangan.	Disperdagin.
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha.		Terwujudnya sistem distribusi barang yang lancar dan informasi harga.	Pengadaan dan Penyaluran Barang Beredar.	Terdatanya data perkembangan harga; Terkendalnya harga kebutuhan pokok; Tersedianya stok kebutuhan pokok di pasar.	10	5	5	5	5				
					Pembinaan Usaha Sarana Perdagangan.	Jumlah sarana pedagang/usaha informal yang dibina.	180	200	200	200	200				
					Pembangunan Sarana Perdagangan.	Jumlah sarana perdagangan yang dibangun.	4	1	1	1	1				
			Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha.	Persentase UTTP bertanda tera sah dan berlaku.	Bina Tata Niaga.	Terbinanya pelaku usaha dan konsumen.	630	646	685	716	749	Peningkatan Perlindungan konsumen dan pelaku usaha.			
					Pengawasan Pelaksanaan Tata Niaga dan Kemetrolagian.	Terawasinya jumlah pelaku usaha yang menggunakan alat UTTP dan BDKT.	150	150	150	150	150				
					Pelayanan Kemetrolagian.	- Jumlah pasar tertib ukur - Terujinya alat UTTP dan BDKT.	6	6	6	6	6				

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PD
							2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9	Meningkatnya Pertumbuhan industri kecil menengah.	Cakupan pembangunan 5 sentra IKM.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.	Jumlah komoditi unggulan IKM.	Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.	Terlaksananya pemberdayaan IKM.	500	500	500	500	500	Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.	Meningkatkan kualitas kelembagaan, akses bahan baku, pasar dan pembiayaan.	Perindustrian.	Disperdagin.
		Cakupan bina industri kecil dan menengah (IKM).			Pengembangan Sumber Daya Industri Kecil dan Menengah.	IKM unggulan yang dibina.	725	725	725	725	725				
					Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana IKM.	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Industri Kecil dan Menengah.	Terbinanya Industri Kecil dan Menengah.	500	500	500	500	500			
10	Mengurangi jumlah pengangguran di Kab Bogor.	1. Pencari Kerja yang di Kab. Bogor 2. Meningkatkan skill para pencari kerja melalui BLK 3. Memberikan solusi pencari kerja memasuki dunia kerja.	Bogor <i>Career Center</i> .	1. Data pengangguran di Kab. Bogor.	Menyediakan aplikasi informasi lowongan kerja dan informasi balai latihan kerja berbasis website kepada masyarakat Kab. Bogor.	Membangun Bogor <i>Career Center</i> .	2400	2500	2600	2700	3000	Memberikan Informasi Lowongan Kerja, Kepada Masyarakat Kab. Bogor, Mensinkronkan informasi di 8 SKPD di dalam Website Bogor <i>Career Center</i> , Penyebaran informasi melalui seluruh stakeholder yang ada di pemerintahan Kab. Bogor.	Menyediakan pusat informasi dan pelayanan ketenagakerjaan	Penempatan dan perluasan Kerja.	Dinas Tenaga Kerja.

6. *Smart Branding*

Sasaran *smart branding* adalah peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PD
							2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya.	Cakupan pengelolaan kekayaan budaya.	Pengelolaan Kekayaan Budaya.	a. Kajian Sejarah Seni dan Budaya di Destinasi Wisata Budaya b. Pembinaan dan Sosialisasi Cagar Budaya Untuk Remaja Siswa/I SLTA c. Pemeliharaan Situs dan Benda Cagar Budaya.		Inventarisasi dan Verifikasi Cagar Budaya (Penetapan Cagar Budaya TK. Kabupaten).	80	90	100	100	100		mengembangkan pariwisata yang edukatif dan kreatif berbasis sumberdaya alam yang berkelanjutan.		DISBUDPAR.
2			Pengembangan Pemasaran Pariwisata.	a. Penyebaran Informasi Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bogor b. Pengadaan Bahan dan Barang Promosi Pariwisata dan Budaya c. Pameran Dalam Negeri d. BTME (Bogor <i>Tourism Mart and Expo</i>) e. Penyusunan Strategi Pemasaran Pariwisata Kabupaten Bogor f. <i>Roadshow</i> Pariwisata Kabupaten Bogor g. Pengadaan Fasilitas Perkantoran TIC h. Festival Makanan dan Minuman (Kuliner) Kabupaten Bogor i. Festival Burung Berkicau j. Pasanggiri Mojang dan Jajaka Tingkat Kabupaten Bogor		Pemasaran potensi pariwisata dan budaya Kabupaten Bogor.	80	90	100	100	100		mengembangkan pariwisata yang edukatif dan kreatif berbasis sumberdaya alam yang berkelanjutan.		DISBUDPAR.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PD
							2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				k. Bogor <i>Wonderfull Golf</i> l. Wisata <i>Rally/Offroad</i> m. Updating Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata n. Penyusunan Data dan Informasi Pariwisata dan Budaya o. Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah/Helaran p. Jambore Desa Wisata per 3 bulan.											
3			Pengembangan Destinasi Pariwisata.	a. Penyusunan <i>Masterplan</i> Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) b. Penerapan Standar Kelayakan Usaha Pada Usaha Jasa Wisata c. Penerapan Standar Kelayakan Usaha Pada Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum d. Penerapan Standar Kelayakan Usaha Pada Obyek/Daya Tarik Wisata e. Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Wisata f. Penyusunan Rencana Pengembangan Destinasi Wisata g. Pembangunan Fasilitas Outbond di Tapak Kegiatan (TPP) Taman Teknologi Pertanian h. Penyusunan Paket Wisata i. Pelaksanaan Travel Dialog j. Revisi Rencana Induk Pengembangan		Pengembangan potensi destinasi pariwisata baru dan penetapan standarisasi usaha bidang pariwisata.	80	90	100	100	100		mengembangkan pariwisata yang edukatif dan kreatif berbasis sumberdaya alam yang berkelanjutan.		DISBUDPAR.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PD
							2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Bogor k. Fasilitasi Penerapan Standar Kelayakan Usaha pada Usaha Akomodasi l. Fasilitasi Penerapan Standar Kelayakan Usaha pada Usaha Restoran dan Rumah Makan.											
4	Meningkatnya pariwisata halal berstandar nasional.	Jumlah usaha pariwisata halal berstandar nasional.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal.	a. Menyiapkan sumberdaya manusia dan sarana prasana. b. Kerjasama dengan MUI mengenai penerbitan sertifikat halal. c. <i>Launching</i> Wisata Halal Kabupaten Bogor.		Terlaksananya kegiatan usaha pariwisata halal.	10	20	30	40	50		mengembangkan pariwisata yang edukatif dan kreatif berbasis sumberdaya alam yang berkelanjutan.		DISBUDPAR.
5	Masyarakat luas.	Tersedianya informasi Kabupaten Bogor.	Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi.	Revitalisasi Website Kabupaten Bogor.	Masyarakat luas.	Tersedianya informasi Kabupaten Bogor.	3	5	5	5	5		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.		DISKOMINFO.
6			PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN.			Pembuatan Wahana Pariwisata Pesona Alam Wangunjaya.	60%	75%	80%	90%	100%		mengembangkan pariwisata yang edukatif dan kreatif berbasis sumberdaya alam yang berkelanjutan.		Kecamatan Leuwisadeng.
7			KEGIATAN PESONA ALAM GEOPARK KECAMATAN LEUWISADENG.			Pembuatan Wahana Pariwisata Pesona Alam Gunung Seureh Desa Wisata Sadeng Situs Peninggalan Sejarah Van Hoffmen Dalam Upaya Mendukung <i>Smart Village</i> .	60%	75%	80%	90%	100%		mengembangkan pariwisata yang edukatif dan kreatif berbasis sumberdaya alam yang berkelanjutan.		Kecamatan Leuwisadeng.
8			Penataan Lingkungan Terpadu Kp, Tangseng Desa Sukaraksa.	1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas sumber daya Manusia dan pelestarian alam 2. Meningkatkan sumber	Wisata Relizi arum jeram.		20	40	60	80	100		mengembangkan pariwisata yang edukatif dan kreatif berbasis sumberdaya alam yang berkelanjutan.		Kecamatan Cigudeg.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PD
							2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				pendapatan Desa dan Masyarakat 3. Tersedianya Insprastruktur jalan 4. Tersedianya Sarana dan Prasarana: Galery UMKM, Gajebo, Sarana MCK.											
9			Potensi Wisata.		Potensi wisata Goa Ciwadon dan Curug Cisedong Desa Cibodas.	Terealisasinya pelaksanaan pembangunan akses jalan menuju goa ciwadon dan Curug Cisedong, Fasilitas penunjang di lokasi seperti Mushola, WC, <i>Food Court</i> , sentra display UMKM.	30	50	75	90	100		mengembangkan pariwisata yang edukatif dan kreatif berbasis sumberdaya alam yang berkelanjutan.		Kecamatan Jonggol.
					Potensi wisata Curug Ciseupang Desa Sukasirna.	Terealisasinya pelaksanaan pembangunan akses jalan menuju Curug Ciseupang, Fasilitas penunjang di lokasi seperti Mushola, WC, <i>Food Court</i> , sentra display UMKM.	30	50	75	90	100		mengembangkan pariwisata yang edukatif dan kreatif berbasis sumberdaya alam yang berkelanjutan.		Kecamatan Jonggol.
10			UMKM.		Peningkatan perekonomian destinasi kuliner.	Fasilitas pembentukan kube, Fasilitas legalitas produk, bantuan peralatan produksi, pelatihan UMKM, Sentral galeri UMKM.	50	60	70	85	100		Meningkatkan kualitas kelembagaan, akses bahan baku, pasar dan pembiayaan.		Kecamatan Jonggol.
11			Peningkatan Kinerja Kecamatan.	1. Terbentuknya Desa Wisata 2. Peningkatan partisipasi masyarakat 3. Terbentuknya tim/kelompok Desa wisata sukaharja 4. Terbangunnya jalur khusus sepeda 5. Terbangunnya trek untuk sepeda MTB (<i>mountain bike</i>)	Kegiatan Pembentukan Desa Wisata 1. Sub kegiatan Sosialisasi Pembentukan Desa wisata 2. Sub kegiatan Pembentukan Tim/Kelompok Desa wisata 3. Sub kegiatan Pembangunan		50	75	90		100		mengembangkan pariwisata yang edukatif dan kreatif berbasis sumberdaya alam yang berkelanjutan.		Kecamatan Cijeruk.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PD
							2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				6. Terbangunnya papan informasi / jalur sepeda.	Infrastruktur Desa.		50	75	90		100				
12			Pengembangan Kemitraan.		Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Wisata Desa.	Lama Kunjungan Wisata.	2	2	2	2	2		mengembangkan pariwisata yang edukatif dan kreatif berbasis sumberdaya alam yang berkelanjutan.		DISBUDPAR.
						Jumlah Desa Wisata.	25	30	35	40	45				DISBUDPAR.
13	Terbangunnya pusat olahraga dengan Sistem Pengelolaan yang terpadu dan terintegrasi.	Indeks <i>Brandid.</i>	Program Pengembangan dan Manajemen Olahraga.	Adanya kepastian tatakelola Stadion, stadion mini serta Gelanggang Olahraga Masyarakat/Remaja.	Menyusun Perda dan atau Perbub tentang Pengelolaan Satdion, stadion mini dan GOM.	Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati.	1	1	5(SOM+SO P)			Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga.	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Olahraga.	Pengembangan dan Industri,Sarana dan Prasarana Olahraga.	Dispora dan Kabag Hukum dan Perundang-undangan.
			Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga.	Cakupan Pembinaan Olahraga.	Meningkatnya Prestasi Olahraga.	Jumlah Pelajar dan Atlit yang berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional atau Internasional.	50	60	100	130	200	Meningkatnya kualitas dan kuantitas olahragawan.	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Insan Olahraga .	Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga.	Dispora.
			Program peningkatan Sarana dan Prasarana.	Presentase Kecamatan yang mempunyai sarana olahraga dan pemuda untuk umum.	Membangun GOM dan Stadion mini di Kecamatan.	Terbangunnya GOM dan Stadion mini di setiap Kecamatan.	7	7	7	7	8	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga.	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Olahraga.	Pengembangan dan Industri,Sarana dan Prasarana Olahraga.	Dispora.

QUICK WIN SMART CITY KABUPATEN BOGOR

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PD
							2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang sinergis.	Keralasan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.	Program Perencanaan Imfrastruktur dan Pengembangan Wilayah.	Tersedianya Bahan Dokumen Perencanaan Sektor Imfrastruktur dan Pengembangan Wilayah.	Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Jaringan Kabupaten Bogor.	Tersedianya <i>Software ArcGIS Server</i> sebagai Pendukung Optimalisasi dan Efektifitas Penyelenggaraan Informasi Geospasial serta pengembangan sistem jaringan inprastruktur geospasial Kab. Bogor.	3 PD	3 PD	3 PD	3 PD	3 PD		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Perencanaan.	BAPPEDA.
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru/RS. Mata.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.	Aplikasi Sistem Informasi Tempat Tidur Ruangan dan Kamar (Si TEGAR).	Terlaksananya Aplikasi Sistem Rujukan pasien di Kabupaten Bogor yang terintegrasi dengan seluruh rumah sakit di Kabupaten Bogor.	80	80	80	80	80	Adanya Kebijakan /Regulasi yang mendasari terlaksananya kegiatan (SK Bupati dan SK Kepala Dinas).	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.	Bidang Pelayanan Kesehatan.	Dinas Kesehatan.
3	Pembangunan <i>Intelligent Transport System</i> (ITS).	Meningkatkan keselamatan, ketertiban, kelancaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.	Manajemen rekayasa lalu lintas.	Pengembangan ITS (Sistem Kontrol Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).	Penanganan titik kemacetan di persimpangan maupun di ruas jalan.	Bertambahnya jumlah penanganan lokasi kemacetan.	20% (4 persimpangan, 2 ruas jalan).	25% (bertambah 4 persimpangan).	30% (bertambah 4 persimpangan).	35% (bertambah 4 persimpangan).	40% (bertambah 4 persimpangan).	Adanya kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bogor dengan pemerintah pusat dalam pembangunan ITS.	Menyelesaikan titik kemacetan.	Perhubungan.	DISHUB.
4	Festival Budaya Tahunan.		Pengembangan Pemasaran Pariwisata.	Penyebaran Informasi Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bogor.		Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah/Helaran.	80	90	100	100	100		mengembangkan pariwisata yang edukatif dan kreatif berbasis sumberdaya alam yang berkelanjutan.		DISBUDPAR.
5	Sistem Pemerintahan Desa.	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan desa berbasis elektronik.	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.	Cakupan Pemerintahan desa yang memanfaatkan Teknologi Informasi.	Implementasi Sistem Informasi layanan administrasi Desa.	Jumlah Desa yang mempergunakan Sisten Informasi dalam menjalankan pemerintahan.	75	100	100	137	417		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.		Diskominfo DPMPD.
6	Sistem Cepat Pelayanan <i>Online</i> Terpadu (SI CEPOT).	a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM petugas rumah Sakit. Meningkatkan pengetahuan teknologi masyarakat kabupaten bogor	Pelayanan kesehatan.	a. Kinerja keuangan b. Kinerja mutu pelayanan c. Kinerja operasional.	a. Rerata kunjungan pasien b. Perbandingan kunjungan pasien baru dan lama c. BOR, LOS, TOI, NDR, GDR	Terlaksananya tata kelola pelayanan pasien terintegrasi dengan SIM RS.	Mempersiapkan pendaftaran <i>online</i> terintegrasi dengan SIM RS di rawat jalan, pengadaan	proses ujicoba pendaftaran rawat jalan <i>online</i> terintegrasi dgn SIMRS secara keseluruhan	sudah berjalan pendaftaran <i>online</i> terintegrasi dengan SIMRS sudah mulai berjalan.	sudah dapat di kembangkan pendaftaran <i>online</i> secara keseluruhan termasuk sudah bias	sudah berjalan system pendaftaran <i>online</i> melalui seluler dan pendaftaran	1. Menetapkan tujuan yang lebih spesifik yaitu peningkatan pelayanan kesehatan kepada pasien	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.	Rumah sakit.	RSUD Cibinong.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PD
							2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		b. Meningkatkan meningkatkan pengetahuan informasi tehnologi masyarakat kabupaten bogor c. Tersediannya sarana dan prasarana yang mendukung tehnologi yang terintegrasi d. Tertatanya alur pelayanan pasien yang terintegrasi dengan SIM RS dan layanan <i>online</i> e. Meningkatkan kuantitas masyarakat kabupaten bogor yang menggunakan saran dan prasarana rumah sakit secara <i>online</i> f. Terpromosinya pelayanan pasien <i>online</i> yang terpadu g. Terawasinya kegiatan pelayanan pasien terpadu secara <i>online</i> h. Terciptanya tertib pada masyarakat dan petugas rumah sakit i. Terjaganya standar pelayanan, mutu pelayanan j. Mempertahankan akreditasi paripurna.			d. Rerata kunjungan rajal perhari e. Rerata kunjungan IGD f. Rerata operasi perhari g. Rerata rehabilitasi medis perhari h. Pemeriksaan RO i. Pemeriksaan Laboratorium.		<i>hardwere, shoftwere, server, aplikasi, tenaga IT progremmer yang kompeten.</i>	dari pasien mendaftarkan lewat <i>online</i> sudah sampai nama pasiennya terhubung.		menampilkan estimasi harga yang harus di keluarkan untuk pasien tunai.	melalui kiostel di RS.	yang berorientasi kepada peningkatan peromorfa rumah sakit, kualitas sumber. 2, Membudayakan organisasi informasi yang akurat mengenai kebutuhan dari setiap bagian yang ada di rumah sakit , serta dapat mengumpukan balikan dari hasil atau kebutuhan yang di perlukan 3, Diadakan pelatihan kepada petugas. 4, Memfasilitasi program kesehatan unggulan 5, Melakukan perbaikan terus menerus.			
7	Mengurangi jumlah pengangguran di Kab Bogor.	1. Pencari Kerja yang di Kab. Bogor 2. Meningkatkan <i>skill</i> para pencari kerja melalui BLK 3. Memberikan solusi pencari kerja memasuki dunia kerja.	Bogor <i>Career Center</i> .	1. Data pengangguran di Kab. Bogor.	Menyediakan aplikasi inofrmasi lowongan kerja dan informasi balai latihan kerja berbasis website kepada masyarakat Kab. Bogor.	Membangun Bogor <i>Career Center</i> .	2400	2500	2600	2700	3000	Memberikan Informasi Lowongan Kerja, Kepada Masyarakat Kab. Bogor, Mensinkronkan inforamsi di 8 SKPD di dalam Website Bogor <i>Career Center</i> , Penyebaran informasi melalui seluruh <i>stakeholder</i> yang ada di pemerintahan Kab. Bogor.	Menyediakan pusat informasi dan pelayanan ketenagakerjaan.	Penempatan dan perluasan Kerja.	Dinas Tenaga Kerja.

PENUTUP

Masterplan Pengembangan Smart city Kabupaten Bogor ini disusun berdasarkan telaah Buku 1 Analisis Strategis *Smart City* Kabupaten Bogor, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen ini. Penyusunan *masterplan* ini juga telah mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014 – 2018.

Dokumen ini diharapkan sebagai acuan dasar bagi pengambil keputusan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bogor selama kurun waktu 5 tahun (2019 -2023) mendatang sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Penyempurnaan dokumen *masterplan* ini dapat dilakukan tanpa menunggu masa berakhirnya dokumen ini. *Masterplan* ini terbuka untuk direvisi sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bogor.

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN